



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2023

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT
PERUNDINGAN
ANTAR
KAWASAN DAN
ORGANISASI
INTERNASIONAL**





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

TAHUN 2023

KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
2024

**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) yang menguraikan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DJPPI Tahun 2020-2024, Rencana Kerja DPAKOI Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2023.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini dalam proses revisi.

Besar harapan kami, Lapkin DPAKOI Tahun 2023 ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM DPAKOI di masa mendatang.

Jakarta, 15 Maret 2024
Direktur Direktorat Perundingan
Antar Kawasan dan Organisasi
Internasional,



Reza Pahlevi Chairul

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) merupakan unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Perdagangan RI. Peran yang diemban Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki peran signifikan dalam upaya peningkatan akses pasar barang di forum Organisasi Internasional. Diplomasi perdagangan tersebut dilakukan dengan tujuan agar kinerja perdagangan berdampak dan bermanfaat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Ditjen PPI dalam Perjanjian Kinerja (Lampiran 1) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni (i) Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; dan (ii) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Secara umum, capaian sasaran program Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja DPAKOI Tahun 2023 disusun untuk melaporkan hasil pemantauan kinerja secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kerja DPAKOI Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2023. Pada Tahun Anggaran 2023, DPAKOI memperjanjikan dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja DPAKOI Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional				
	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	Kegiatan	5	5	100
2.	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	86.7	108.3
3.	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional				

	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persen	83	84,2	104,8
Rata-rata Capaian Tahun 2023					104,0
Rata-rata Capaian Tahun 2022					113,4
Perbandingan rata-rata Capaian Tahun 2023 dengan 2022					0,9

Sumber: DPAKOI, 2024

Secara umum, tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Tahun 2023 telah mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tiga indikator kinerja yang telah ditetapkan memiliki capaian 113,4 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian sebesar 112,5 persen, capaian pada tahun 2023 sebesar 113,4 persen mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen.

Penjelasan detail mengenai realisasi anggaran dan realisasi kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi internasional dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Terdapat dua sasaran kegiatan (Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional dan Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia) sebagai indikator pencapaian tujuan DPAKOI. Dari dua sasaran tersebut terdapat tiga indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2. Realisasi Capaian Anggaran DPAKOI Tahun 2023

Tahun Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Pagu Anggaran Setelah Pemotongan	Realisasi Anggaran	Realisasi
Rp 4.166.000.000	Rp 5.100.000.000	Rp 4.974.436.680	97,54%

Sumber: DPAKOI (2024)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN	
EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTARGAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
LATAR BELAKANG	8
STRUKTUR ORGANISASI	9
PERAN STRATEGIS ORGANISASI	11
ISU STRATEGIS	16
PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
RENCANA STRATEGIS	21
PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
SASARAN STRATEGIS: IK-1	33
KEGIATAN APEC DAN OI	39
KEGIATAN FASILITASI & INVESTASI APEC	44
KEGIATAN KOMODITAS INTERNASIONAL	46
KEGIATAN DI FORUM D8/OKI	48
KEGIATAN OI LAINNYA	50
SASARAN STRATEGIS 2: IK-2	51
FORUM APEC	55
DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (DSM) of D-8	57
FORUM INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO)	58
ITRC	59
COMCEC FINANCIAL SUPPORT INSTRUMENT	60
INDIKATOR KINERJA 3: IK-3	61
BAB IV KINERJA ANGGARAN	70
BAB V PENUTUP	72
KESIMPULAN	74
REKOMENDASI	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen DPAKOI Tahun 2023	4
Tabel 2. Realisasi Capaian Anggaran DPAKOI Tahun 2023	5
Tabel 3. Jumlah dan Kualifikasi SDM DPAKOI Tahun 2023	11
Tabel 4. Indikator dan Target Kerja 2020-2024 atas Renstra DJPPI	22
Tabel 5. Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2023	24
Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi DPAKOI Tahun 2023	25
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	28
Tabel 8. Rincian Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	29
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	52
Tabel 10. Masukan Indonesia yang Diterima pada Statement of the Chair - Ministers Responsible for Trade Meeting 2023	54
Tabel 11. Masukan Indonesia yang Diterima pada Joint Ministerial Statement – 34th APEC Ministerial Meeting 2023	55
Tabel 12. Masukan Indonesia yang Diterima pada 30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Golden Gate Declaration	56
Tabel 13. Masukan Indonesia yang Diterima pada 30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Annex: San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy	56
Tabel 14. Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir	57
Tabel 15. Masukan Indonesia yang Diakomodir pada forum G20	59
Tabel 16. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	62
Tabel 17. Realisasi Kinerja Anggaran DPAKOI 2023	71
Tabel 18. Realisasi Anggaran DPAKOI 2023	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DPAKOI Tahun 2023	11
Gambar 2. Direktur DPAKOI pada pertemuan APEC CTI1 2023	29
Gambar 3. Direktur DPAKOI dan Direktur DPPJ memimpin APEC CTI2 2023	30
Gambar 4. Dirjen PPI dan Direktur DPAKOI mendampingi Mendag pada APEC MRT 2023	31
Gambar 5. Direktur DPAKOI memimpin DELRI pada APEC CTI3 2023	32
Gambar 6. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI1 2023	33
Gambar 7. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bersama Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI2 2023	34
Gambar 8. Mendag RI menghadiri Mendag APEC di Amerika Serikat	35
Gambar 9. Pertemuan Menteri APEC tanggal di San Francisco, Amerika Serikat	36
Gambar 10. Delegasi Indonesia dalam rangkaian Pertemuan ke-38 ITRC	37

Gambar 11. Delegasi Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Tahunan ANRPC di Guwahati, India	39
Gambar 12. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada Sesi Tahunan ke-59/Pertemuan Tingkat Menteri ICC di Bandar Lampung	40
Gambar 13. Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-135 tanggal 30 Maret 2023 secara virtual	41
Gambar 14. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Pertemuan Eksekutif ke-51 HoD IPC di Kuching, Malaysia	44
Gambar 15. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Focus Group Discussion “Strategi Prospek dan Peluang Peningkatan Ekspor Produk Halal ke Negara OKI	50
Gambar 16. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Jaring Masukan Strategi Penguatan Prioritas Perdagangan Indonesia Dalam Kerangka G20	63
Gambar 17. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Lokakarya Langkah Progesif Indonesia untuk Penanganan Limbah Plastik dan Sinergisitas Isu Keberlanjutan APEC Tahun 2023	65
Gambar 18. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Jaring Masukan Pemanfaatan COMCEC Project Funding sebagai Strategi Peningkatan Ekspor ke Negara Anggota OKI	66
Gambar 19. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Diskusi Kesiapan Kebijakan Indonesia untuk Isu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perundingan terkait persiapan Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP) dan Perundingan APEC lainnya	67
Gambar 20. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Jaring Masukan Concept Note Inisiatif Indonesia di Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Mendorong Praktik-Praktik Berkelanjutan pada UMKM Makanan dan Minuman di Kawasan APEC	69

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan DPAKOI kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok DPAKOI yang harus dipertanggungjawabkan kepada Ditjen PPI dan *stakeholders* lainnya.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 yang saat ini dalam proses revisi dan untuk rancangan yang baru masih belum disahkan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat merupakan media pertanggungjawaban DPAKOI dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kementerian dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis DPAKOI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan

perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2023.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Direktorat Perundingan Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 164, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2.1 Kelompok Jabatan Fungsional pada Akses Perdagangan dan Akses Investasi APEC
 - 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional pada Fasilitasi Perdagangan dan Fasilitasi Investasi APEC
 - 2.3 Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Komoditi
 - 2.4 Kelompok Jabatan Fungsional pada G20) dan OI
 - 2.5 Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi OKI dan D8

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari :

- i. Direktur : 1 orang
- ii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
- iii. Negosiator Ahli Madya : 5 orang
- iv. Negosiator Ahli Muda : 9 orang
- v. Negosiator Ahli Pertama : 11 orang
- vi. Analis Perdagangan Ahli Muda : 1 orang
- vii. Analis Perdagangan Ahli Pertama : 1 orang
- viii. Analis Data dan Informasi : 3 orang
- ix. Verifikator Keuangan : 1 orang
- x. Honorer : 6 orang

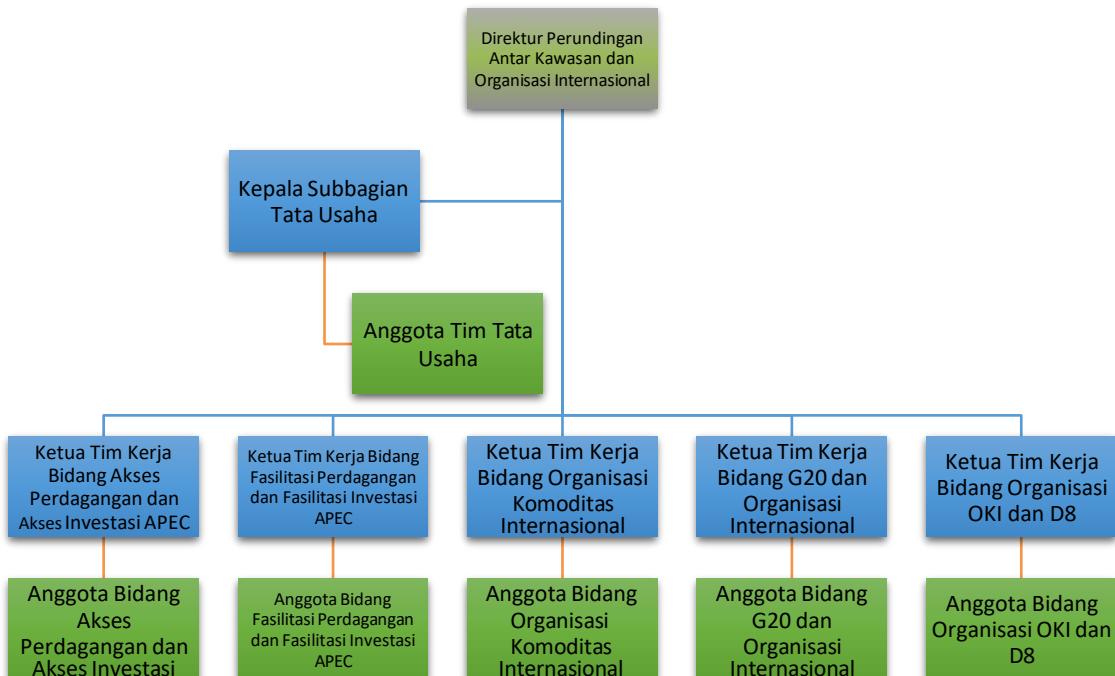
Jumlah : 39 orang

Tabel. 3 Jumlah dan Kualifikasi SDM

No .	Pendidikan	Jumlah PNS & CPNS				Jumlah
		Honorer	Go. II	Gol. III	Go. IV	
1	SLTA	3	-	-	-	3
2	D3	-	1	-	-	1
3	S1	3	-	13	-	16
4	S2	-	-	12	7	19
5	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		6	1	25	7	39

Sumber: DPAKOI (2024)

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL, DITJEN PPI



Sumber: DPAKOI (2024)

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategis Akses Perdagangan dan Akses Investasi APEC

Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) merupakan instansi penjuru nasional di perundingan Komite Perdagangan dan Investasi (*Committee on Trade and Investment/CTI*) APEC yang juga mengkoordinasikan *sub-fora* di bawah CTI. Forum-forum di bawah CTI tersebut membahas permasalahan, tantangan, dan inisiatif lebih teknis sesuai dengan fokus masing-masing kelompok kerja yaitu terkait perdagangan jasa (Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kemendag); standar (Badan Standarisasi Nasional), akses pasar (DPAKOI, Kemendag); investasi (BKPM), dialog industri otomotif dan kimia (Kemenperin).

Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam diplomasi ekonomi di forum APEC melalui kontribusi pada inisiatif yang diusulkan oleh Ekonomi anggota APEC lainnya yang akan membawa manfaat untuk perdagangan dan investasi serta perekonomian di Indonesia seperti peningkatan akses pasar untuk produk-produk unggulan domestik yang didorong untuk memiliki daya saing di pasar luar negeri dan berupaya untuk membuka akses investasi melalui forum tersebut. Indonesia

jugak aktif dalam menyusun dan mengusulkan inisiatif-inisiatif melalui kerja sama ekonomi dan teknik terkait peningkatan akses pasar untuk produk-produk unggulan domestik dan didorong memiliki daya saing di pasar luar negeri yang berhasil disepakati dan mendapat pembiayaan dari APEC yang berguna dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya domestik pada khususnya dan Ekonomi anggota APEC pada umumnya. Indonesia juga aktif dalam ikut memberikan kontribusi baik berupa tanggapan/masukan/dukungan atas inisiatif-inisiatif yang diajukan oleh Ekonomi anggota APEC lainnya.

Hal ini merupakan bentuk kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama internasional di forum APEC. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahun Indonesia memberikan kontribusi sebesar USD 75.000 kepada APEC, dan menurut informasi Kementerian Luar Negeri, Indonesia rata-rata mendapatkan manfaat melalui kerjasama ekonomi dan teknik melalui pilar *capacity building*, sebesar USD 1 juta. Pada tahun 2023, Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah melakukan implementasi inisiatif *"Study on Strategy to Promote the Utilisation of the APEC Trade Repository" di forum Market Access Group (MAG)* dan menjadi co-sponsor beberapa inisiatif Ekonomi anggota APEC antara lain *"APEC Workshop on Promoting One Village One Product (OVOP) through E-commerce"* dan *"Promote Green Garment and Textile Sector towards Inclusive and Sustainable Growth"* usulan Vietnam.

Peran Strategis Fasilitasi Perdagangan dan Fasilitasi Investasi APEC

Partisipasi aktif Indonesia melalui Kementerian Perdagangan di fora APEC diperlukan guna mengantisipasi kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya akan diadopsi menjadi tata aturan kebijakan oleh seluruh Ekonomi anggota APEC, salah satunya terkait upaya fasilitasi perdagangan bagi anggotanya. Oleh karena itu, partisipasi Indonesia dalam perundingan APEC menjadi sangat penting untuk memastikan hasil kesepakatan tersebut selaras dengan kebijakan nasional sehingga akan memberi dampak positif dengan terciptanya tata aturan yang kondusif dalam sistem perdagangan internasional kawasan Asia Pasifik. Terciptanya tata aturan yang kondusif akan dapat meningkatkan sektor perdagangan Indonesia yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai instansi penjuru nasional pada perundingan CTI secara khusus mengambil peranan dalam perundingan dan kerja sama fasilitasi perdagangan dan fasilitasi investasi di fora CTI maupun sub-fora di bawah CTI yang mencakup integrasi ekonomi regional, perwujudan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik (*Free Trade area of Asia Pacific/FTAAP*), isu hak kekayaan intelektual,

transparansi kebijakan kerjasama peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan rantai suplai, agenda ekonomi digital dan konektifitas kawasan Asia Pasifik.

Dalam mengupayakan agar Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari kerja sama fasilitasi perdagangan dan investasi APEC, DPAKOI melakukan pembahasan inisiatif lebih teknis dilakukan di sub-fora di bawah CTI dengan fokus masing-masing kelompok kerja yaitu terkait prosedur dan fasilitasi Kepabeanan (Ditjen. Bea dan Cukai, Kemenkeu); mobilitas pelaku usaha (Ditjen. Imigrasi, Kemenkumham); Kekayaan Intelektual (DJKI, Kemenkumham); dan Ekonomi Digital (Kominfo dan Kemlu).

Peran strategis Organisasi Komoditi Internasional

Keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor komoditas utama perkebunan seperti sawit, karet, kopi, kelapa, dan lada, bergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia saat ini, kemampuan sistem perdagangan internasional, dan kemampuan ekonomi nasional dalam beradaptasi terhadap perkembangan perekonomian internasional. Di sisi lain, tantangan dalam peningkatan ekspor komoditas Indonesia adalah masih rendahnya posisi tawar negara produsen, menjaga stabilitas harga komoditas internasional di level yang menguntungkan bagi petani dan berbagai hambatan dan diskriminasi perdagangan oleh negara konsumen termasuk penerapan sertifikasi dan standar *sustainability* komoditas.

Untuk mendukung peningkatan akses pasar dan melindungi komoditas ekspor, Indonesia tergabung dalam organisasi komoditas internasional sebagai salah satu strategi kebijakan perdagangan. Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PPI merupakan *focal point* atau instansi penjuru pada perundingan isu perdagangan di Forum Organisasi Komoditas, yaitu: International Tripartite Rubber Council (ITRC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Coffee Organization (ICO), International Coconut Community (ICC), dan International Pepper Community (IPC). Melalui keanggotaan dan partisipasi aktif pada OI Komoditas, Indonesia memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional, antara lain: penguatan posisi tawar negara produsen; menjaga stabilitas harga di tingkat yang remunerative bagi petani; mengatasi hambatan dan diskriminasi perdagangan termasuk mendorong penyusunan standar *sustainability* sesuai standar negara produsen. Perundingan yang dilaksanakan di fora OI Komoditas perundingan multilateral/plurilateral bersifat strategis karena menitikberatkan pada dukungan politis dan komitmen negara anggotanya melalui kesepakatan pemimpin atau pejabat negara. Langkah ini sering kali diperlukan untuk mengatasi hal-hal kritis yang menjadi masalah bagi ekonomi dan perdagangan dunia secara cepat.

Peran strategis Group of Twenty (G20)

G20 merupakan forum kerja sama ekonomi internasional terkemuka yang terdiri dari 20 anggota (19 negara dan Uni Eropa) dengan *Gross Domestic Product* (GDP) terbesar untuk mencari cara menghadapi berbagai tantangan utama ekonomi dunia, melalui dialog dan kebijakan politik para pemimpinnya. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili 85 persen GDP dunia, 75 persen perdagangan global, dan dua-per-tiga penduduk dunia bermukim di negara-negara G20. Dengan kekuatan dan indikator-indikator ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota, G20 memiliki modalitas yang kuat sebagai *main driver* kerja sama ekonomi dunia serta pengaruh yang besar bagi pengelolaan perekonomian global dan sistem finansial. Anggota G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Keanggotaan pada G20 telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci pada perekonomian global. G20 merupakan sarana strategis untuk dapat mengekstrapolasikan kepentingan nasional Indonesia ke level global. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang juga menjadi anggota G20, keanggotaan di G20 juga berperan penting dalam memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di ASEAN karena dapat menjadi jembatan suara kolektif negara-negara ASEAN untuk G20.

Pembahasan sektor perdagangan di G20 dilakukan melalui G20 *Trade and Investment Working Group* (TIWG). Perundingan G20 TIWG telah dilaksanakan oleh Presidensi RRT (2016), Presidensi Jerman (2017), Presidensi Argentina (2018), Presidensi Jepang (2019), Presidensi Arab Saudi (2020), Presidensi Italia (2021), Presidensi Indonesia (2022), dan Presidensi India (2023).

Kementerian Perdagangan sebagai instansi penjuru (focal point) Indonesia untuk G20 TIWG perlu terus berperan aktif dalam perundingan di sektor perdagangan dengan negara anggota G20, guna memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia dan negara berkembang, serta menciptakan koherensi di tingkat multilateral/ plurilateral.

Peran strategis Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Developing Eight (D-8)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didirikan di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969. Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Seiring

perkembangannya OKI berubah nama pada tanggal 28 Juni 2011 dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerja Sama Islam.

Pada 13th Session of the *Islamic Summit Conference* tanggal 10-15 April 2016 di Istanbul, Turki, negara anggota menyepakati Target OIC-2025: *Program of Action*, yang menetapkan target pertumbuhan perdagangan intra OKI hingga 25% pada 2025. Namun demikian, tantangan terbesar bagi OKI di bidang ekonomi dan perdagangan adalah masih rendahnya GDP sebagian besar negara anggota OKI dan tingginya kesenjangan ekonomi di antara negara anggota OKI.

Kerja sama perdagangan intra OKI diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kendala dan ketimpangan ekonomi di antara negara-negara anggota. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara anggota, OKI mendirikan komisi khusus dalam struktur organisasinya, yaitu *The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation* (COMCEC). COMCEC telah menetapkan *COMCEC Strategy* yang terdiri dari dua instrumen penting, yaitu *COMCEC Working Group Meeting* dan *COMCEC Project Funding*. Kementerian Perdagangan merupakan instansi penjuru (*focal point*) Indonesia untuk *COMCEC Trade Working Group* telah aktif terlibat dalam implementasi program kerja sama peningkatan perdagangan dengan negara anggota OKI melalui *COMCEC Project Funding*.

Developing Eight (D-8) didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 D-8 pada tanggal 15 Juni 1997 di Istanbul, Turkiye. Pada KTT ke-5 D-8 tahun 2006 di Bali, para pemimpin negara D-8 menandatangani dua perjanjian perdagangan di antara negara anggota, yaitu D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) dan Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (AACM).

Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sekitar USD 4.8 triliun dan jumlah penduduk sekitar 1,15 miliar pada tahun 2020, D-8 merupakan salah satu *economic grouping* negara berkembang yang potensial. Berdasarkan prediksi *Price Waterhouse Coopers*, seluruh negara anggota D-8 akan berada dalam 25 negara dengan perekonomian terbesar pada 2050 sehingga D-8 dapat menjadi forum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. D8 juga dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi di tingkat regional dan internasional serta mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut

ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 82 ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi dan berperan aktif untuk mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan dan kerjasama di forum kerja sama perdagangan yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain.

Perundingan dan kerja sama juga dilakukan secara plurilateral dalam konteks regional dan multilateral serta lembaga/ organisasi internasional. Secara khusus, perundingan dan kerja sama yang tersebut meliputi *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan fora kerja sama perdagangan lainnya seperti *Association of Natural Rubber Producing Countries* (ANRPC), *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), *International Coconut Community* (ICC), *International Coffee Organization* (ICO), *International Pepper Community* (IPC), *International Tripartite Rubber Council* (ITRC), *Group of Twenty* (G-20), *Organisasi Kerja Sama Islam* (OKI), *Developing Eight* (D8), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP), *World Economic Forum* (WEF), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan organisasi internasional lainnya.

Isu Strategis Akses Perdagangan dan Akses Investasi APEC

Isu utama dan penting yang dibahas pada Akses Perdagangan dan Akses Investasi APEC, antara lain: 1) Dukungan terhadap Sistem Perdagangan Multilateral yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari sektor publik dan bisnis, menyangkut pelaksanaan fungsinya dalam mengatur tata perdagangan global sebagai forum perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa; 2) Realisasi Integrasi Ekonomi Regional yang dapat memajukan akses pasar di Kawasan Asia Pasifik sesuai dengan semangat perdagangan yang bebas, terbuka, dan adil berlandaskan visi Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040 dan *Aotearoa Plan of Actions* (APA); 3) Rencana implementasi PV 2040 dan APA; 4) Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor; 5) Inklusivitas dan isu berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema kerjasama ekonomi kawasan; 6) Dukungan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Ekonomi anggota APEC untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di wilayah APEC; dan 7) Peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Hasil dari pembahasan isu-isu penting bidang akses perdagangan dan akses investasi pada forum APEC diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, penciptaan iklim bisnis yang stabil dan dapat diprediksi, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, dan pasar yang terintegrasi di Kawasan Asia

Pasifik. Hal tersebut semakin memperjelas pentingnya partisipasi Indonesia dalam forum APEC sebagai *platform* bagi Indonesia untuk membangun konsensus pembentukan tata aturan perdagangan internasional yang seimbang, inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dari praktik-praktek perdagangan internasional yang tidak adil.

Isu Strategis Fasilitasi Perdagangan dan Fasilitasi Investasi APEC

Sebagai forum kerja sama ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik, APEC memainkan peran yang sangat penting dalam upaya bersama para anggotanya untuk mengatasi kondisi global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian. Pertemuan APEC menghasilkan kesepakatan penting yang diambil oleh para pemimpin ekonomi dan menteri anggota, menjadikannya sebagai forum yang sangat efektif dalam membentuk strategi dan tindakan untuk mengatasi permasalahan global.

Dalam hal peningkatan fasilitasi perdagangan dan fasilitasi investasi APEC antara lain mencakup tindak lanjut realisasi FTAAP melalui FTAAP *Workplan*, kerangka kerja peningkatan rantai suplai (*Supply Chain Framework Action Plan/SCFAP*), kerja sama pengembangan manajemen pengoperasian pelabuhan dengan memanfaatkan ICT/e-port (*Asia Pacific Model E-port Network/APMEN*), serta kegiatan peningkatan kapasitas pada sektor perdagangan digital. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mengedepankan pentingnya pemahaman bersama atas upaya perwujudan FTAAP di antara Ekonomi anggota APEC. Indonesia juga menekankan pentingnya aspek peningkatan kapasitas serta *best-practice sharing* dalam mengupayakan inisiatif fasilitasi perdagangan di APEC.

Isu Strategis G20

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) India yaitu (1) Trade for Growth & Prosperity; (2) Trade & Resilient GVCs; (3) Integrating MSMEs in Global Trade; (4) Logistics for Trade; dan (5) WTO Reform. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 1 pada tanggal 28 – 30 Maret 2023 di Mumbai, India. Pertemuan TIWG 1 membahas isu prioritas (1), (2), (3), dan (4). Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan pada Presidensi G20 India 2023 adalah sebagai berikut:

- Isu prioritas 1 - Trade for Growth & Prosperity: Indonesia mendorong adanya dimensi development dalam trade untuk pencapaian SDGs.
- Isu prioritas 2 - Trade & Resilient GVCs: Indonesia mendorong alih teknologi dan peningkatan partisipasi negara berkembang dalam GVC
- Isu prioritas 3 - Integrating MSMEs in Global Trade: Indonesia mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam akses finansial, akses informasi, dan akses teknologi

- Isu prioritas 5 - WTO Reform: Indonesia mendorong reformasi WTO, pemulihan appellate body, penguatan MTS untuk strengthening trust, dan tindak lanjut hasil-hasil MC12

Isu strategis Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Developing Eight (D-8)

Salah satu isu strategis yang penting bagi OKI adalah bagaimana meningkatkan efektivitas organisasi dalam memperjuangkan isu-isu penting yang berkaitan dengan Islam, seperti perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia. OKI perlu terus berinovasi dan mengembangkan program-program kerja sama yang konkret dan berdampak positif bagi anggota OKI, serta memperkuat hubungan dengan organisasi-organisasi lain di tingkat regional dan internasional.

Sementara itu, untuk D-8, isu strategis yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama *Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States* (PTA D-8) yang telah disepakati oleh anggota, namun pelaksanaan perjanjian ini masih menunggu keputusan dari *supervisory committee* D-8. D-8 perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi, serta memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan energi.

PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Usaha pencapaian sasaran strategis diperkirakan akan menghadapi tantangan karena adanya resiko ketidakpastian yang masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia ke depan. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pada periode 2020-2024 diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun. Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi dunia juga diprediksi akan diperparah dengan ancaman resesi global akibat merebaknya pandemi Covid-19. Kejadian luar biasa yang melanda banyak negara di dunia sejak Desember 2019 ini membuat Bank Dunia dan Lembaga *International Monetary Fund* (IMF) terus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi tajam sebesar -3% pada tahun 2020 yang merupakan angka terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak

kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, kondisi geopolitik, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional didasarkan pada Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan visi dan misi Ditjen PPI yang merupakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Ditjen PPI, DPAKOI mendukung visi dan misi Ditjen PPI yaitu pada peningkatan akses pasar Indonesia di pasar internasional melalui perundingan di forum antar kawasan dan organisasi internasional dan menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional.

Peningkatan akses pasar di forum antar kawasan dan organisasi internasional lainnya dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif untuk membuka akses pasar dan fasilitasi perdagangan. Perwujudan tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia dilakukan melalui perundingan perdagangan yang berkualitas untuk mengajukan kepentingan perdagangan Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional.

Sementara itu, melalui keterlibatan pada berbagai fora organisasi komoditi internasional, dapat diupayakan stabilisasi harga komoditas melalui upaya diplomasi pada perundingan berbagai organisasi komoditi internasional dimaksud. Secara khusus, masing-masing organisasi memiliki mekanisme tertentu, seperti ITRC yang memiliki mekanisme *Supply Management Scheme (SMS)*, *Agreed*

Export Tonnage Scheme (AETS), dan Strategic Market Operation (SMO). Keempat organisasi lainnya memiliki mekanisme stabilisasi harga secara eksplisit yang dibahas dalam agenda pelaporan situasi pasar komoditas dan pelaporan data statistik. Kedua pembahasan agenda tersebut akan mengerucut pada pembahasan stabilisasi harga komoditas yang didasarkan pada situasi pasar dan transparansi data statistik negara anggota. Berdasarkan agenda pembahasan dimaksud, organisasi komoditas internasional mengeluarkan laporan resmi harga komoditas internasional pada situs mereka. Laporan ini juga secara rutin disampaikan kepada para petani di tingkat domestik, seperti informasi harga lada melalui sms yang diberikan oleh IPC bagi petani terdaftar di Indonesia.

Target kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada tahun 2023 fokus kepada perundingan perdagangan internasional di forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; 2) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini; 3) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan Antar Kawasan dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Tabel 4. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024 BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS DJPPI

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	4	4	5	5	6
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	80	80	80	80
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	77	79	81	83	85

Sumber: DPAKOI (2024)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran, sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja DPAKOI tahun 2023, dimana secara keseluruhan terdapat tiga Indikator Kinerja dari dua Sasaran Program yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR
KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

Tabel. 5 Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	5 (kegiatan)
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 (persen)
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Percentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	83 (persen)

Sumber: DPAKOI (2024)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kinerja Nomor: 01/PPI/PK/01/2021, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2023 terdiri dari 3 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2023. Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2023 menggunakan metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja: Rumus perhitungan ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} \times 100\% \text{ Target}$$

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pada pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 dan RENSTRA serta program Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Multilateral memiliki tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja strategis yang menggambarkan kinerjanya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing indikator akan dilaporkan realisasi dan capaian secara periodik tiga bulanan, untuk mengetahui dan mengukur perkembangannya. Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan target 2023 sesuai dengan RENSTRA 2020-2024. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dalam pengukuran kegiatan melakukan evaluasi pertiga bulan selama, empat kali selama setahun dalam bentuk Pencapaian Program Sasaran (PPS) maka terdapat PPS pada triwulan I, II, III dan IV pada tahun 2023. Dalam rangka peningkatan kerja sama perdagangan

multilateral, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUA N	TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
	1	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Kegiatan	5	5	100
2.	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
	2	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	86.7	108.3
3.	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional					
	3	Percentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persen	83	84.2	104.8
Rata-rata Capaian Tahun 2023						109,0

Sumber: DPAKOI (2024)

Terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia, dan Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional.

Dalam sasaran meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dengan indikator kinerja jumlah kegiatan kerja sama

bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional mencakup 3 (tiga) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.
- b. Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional.
- c. Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundungan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional.

Sasaran Program 1

Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Cara Perhitungan:

$$KS_t = \sum KS_{jt}$$

KS_t= Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan

KS_{jt}= Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR	2022			2023		
	TARG ET	REALI SASI	CAPAIAN (%)	TARG ET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (kegiatan)	5	5	100	5	5	100

Sumber: DPAKOI (2024)

Untuk Perbandingan antara capaian kinerja kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir tidak terdapat sumber pendukung.

Tabel 8. Rincian Target Indikator Kinerja DPAKOI 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rincian Target	REALISASI	PERSENTASE
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	(5 kegiatan)	Kegiatan APEC Akses: SOM1,SOM2, MRT,SOM3, AELW	5 kegiatan	100%
		Kegiatan APEC Fasilitasi: SOM1,SOM2, MRT,SOM3, AELW		
		Kegiatan Komoditi		
		Kegiatan D8/OKI: COMCEC TWG		
		Kegiatan OI Lainnya: UNESCAP		

Sumber: DPAKOI (2024)

Integrasi ekonomi melalui perdagangan internasional akan melahirkan kompetisi yang berujung pada peningkatan kegiatan akses pasar yang dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan. Di sisi lain, keterbukaan akses pasar barang antar negara memberikan dampak bagi keterbukaan informasi dan komunikasi.

B. KEGIATAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Forum Antar Kawasan fokus pada peningkatan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan kawasan melalui kerja sama teknis antar anggota Ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Berbagai inisiatif yang diajukan oleh Ekonomi proponen memberikan dampak positif dalam penyusunan kebijakan berdasarkan praktik terbaik untuk memfasilitasi perdagangan yang diharapkan dapat berdampak secara positif pada peningkatan akses pasar barang. Sepanjang tahun 2023, komite perdagangan dan investasi APEC melaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan

1. Akses Perdagangan dan Investasi APEC

First Senior Officials Meeting (SOM1)

Perwakilan DPAKOI memimpin Delegasi Indonesia pada pertemuan *Committee on Trade and Investment* (CTI) yang merupakan bagian dari Rangkaian Pertemuan *First Senior Officials Meeting* (SOM1). Target output yang dihasilkan berupa *summary record* pertemuan yang dilaporkan ke *Senior Officials* serta perkembangan inisiatif yang sejalan dengan prioritas tuan rumah APEC 2023, Amerika Serikat. Pertemuan didahului dengan beberapa pertemuan subfora di bawah supervisi CTI antara lain: Chemical Dialogue (CD), Business Mobility Group (BMG), Investment Experts Group (IEG), Sub-Committee on Customs Procedures Meeting (SCCP), Sub-Committee on Standards and Conformance Meeting (SCSC), Digital Economy Steering Group (DESG), Intellectual Property Rights Expert Group (IPEG), Group on Services (GOS), dan Market Access Group (MAG). Direktur PAKOI, Kemendag, Atase Perdagangan KBRI Washington D.C.,

Kepala ITPC Los Angeles serta anggota delegasi RI dari Kemendag dan Kemlu berpartisipasi aktif pada pertemuan tersebut.

Agenda utama pertemuan diantaranya membahas: i) Prioritas APEC 2023 Keketuaan AS; ii) Tindak lanjut *Bangkok Goals* & Mandat Menteri dan Pemimpin Ekonomi APEC tahun 2022; iii) Dukungan terhadap Sistem Perdagangan Multilateral; iv) Integrasi Ekonomi di Kawasan; v) Fasilitasi Perdagangan, Konektivitas, Digitalisasi dan Inovasi; vi) Inklusi dan Keberlanjutan; dan vii) Laporan *Convenor Sub-fora*.



Gambar 2. Partisipasi Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI1 2023

Second Senior Officials Meeting (SOM2)

Pertemuan kedua komite perdagangan dan investasi dilaksanakan pada tanggal 21 - 22 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat (AS). Target output berupa *summary record* pertemuan mencakup posisi komite untuk isu-isu strategis yang akan diangkat dalam draf kesepakatan Menteri Perdagangan pada pertemuan APEC *Ministers Responsible for Trade* (MRT). Pertemuan berhasil menyepakati 3 (tiga) inisiatif: “*A new look at the FTAAP: A proposal for a Focus Area to be part of the FTAAP Agenda Work Plan*” (usulan Peru); “*Workshop on the prospects of low carbon trade in the APEC region*” (usulan Kanada); dan “*Exploring interoperability in APEC approaches on Green Finance and Sustainable Investing*” (usulan Rusia). Ekonomi anggota termasuk Indonesia juga menyepakati langkah bersama implementasi FTAAP *Agenda Work Plan*.



Gambar 3. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI2 2023

Ministers Responsible for Trade Statement of Chair (MRT)

Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan Ekonomi APEC berlangsung pada tanggal 25-26 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Menteri Perdagangan RI menyeru kelanjutan komitmen untuk memperkuat kemitraan kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut menjadi penting, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di masa depan. Untuk itu, Ekonomi APEC harus mempersiapkan diri melalui kebijakan yang merangkul semua anggota untuk berkembang. Tindakan kolektif dan upaya-upaya kemitraan adalah tulang punggung dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif. Selain itu, kebijakan perdagangan terkait lingkungan harus sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan untuk semua kalangan. Transformasi digital rantai pasok di kawasan Asia-Pasifik juga harus menjembatani kesenjangan digital. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui upaya peningkatan kapasitas, mendukung ketahanan, dengan menghormati kebijakan domestik masing-masing Ekonomi.



Gambar 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Mendampingi Menteri Perdagangan RI pada Pertemuan APEC *Minister Responsible for Trade Meeting (MRT) 2023*

Third Senior Officials Meeting (SOM3)

Pertemuan APEC *Third Committee on Trade and Investment* (CTI3) dilaksanakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat (AS) tanggal 13-14 Agustus 2023. Target output berupa *summary record* pertemuan yang memuat posisi komite untuk isu-isu strategis yang akan diangkat dalam draf kesepakatan Menteri Ekonomi anggota APEC pada pertemuan APEC *Ministerial Meeting* (AMM) dan kesepakatan Pemimpin Ekonomi anggota APEC pada pertemuan APEC *Economic Leaders Meeting* (AELM). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 menyampaikan paparan perkembangan perundingan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Indonesia juga mengapresiasi berbagai upaya, inisiatif dan dedikasi ekonomi APEC dalam mendorong upaya perwujudan kawasan perdagangan bebas Asia-Pasifik/ *Free Trade Area of the Asia Pacific* (FTAAP) melalui pembahasan Rencana Kerja Agenda FTAAP. Indonesia juga menegaskan pentingnya pendekatan berimbang dalam setiap upaya perwujudan FTAAP dengan memperhatikan keragaman situasi dan konteks ekonomi anggota.

APEC Economic Leaders Week (AELW)



Gambar 5. Menteri Perdagangan RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada rangkaian Pertemuan APEC *Economic Leaders Week (AELW)* 2023

Pertemuan APEC *Economic Leaders Week (AELW)* berlangsung pada tanggal 16-17 November 2023. Presiden Republik Indonesia turut hadir pada pertemuan tersebut di dampingi oleh Menteri-Menteri Ekonomi anggota APEC termasuk Menteri Perdagangan. Dalam rangkaian Pertemuan AELW tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri APEC (*APEC Ministerial Meeting/AMM*) ke-34 yang berlangsung pada 14-15 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat. Selain reformasi WTO, Menteri Perdagangan menekankan perlunya penyelesaian segera isu-isu penting terkait perdagangan multilateral meliputi perundingan pertanian terutama *Public Stock Holding (PSH)* untuk ketahanan pangan, subsidi perikanan yang berimbang, isu *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Waiver*, dan keputusan yang lebih mengakomodasi negara berkembang dalam pembahasan moratorium cukai transmisi elektronik (CDET). Pertemuan Tingkat Menteri APEC 2023 juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif untuk memberikan manfaat dan mendorong masa depan yang adil dan merata di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut juga menyepakati *San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy* yang merangkum prinsip-prinsip dalam meningkatkan upaya APEC penyusunan kebijakan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Kegiatan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi APEC

First Senior Officials Meeting (SOM1)

Pertemuan pertama *Committee on Trade and Investment* (CTI) yang merupakan bagian dari rangkaian SOM1. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2023 di Palm Springs, Amerika Serikat. Selaku tuan rumah, Amerika Serikat mengangkat tema “*Creating a Resilient and Sustainable Future for All*” dengan prioritas *interconnected, innovative, dan inclusive.*” Pertemuan membahas tindak lanjut inisiatif *Free Trade Area of the Asia Pasific* (FTAAP) *Agenda Work Plan* sebagai bentuk komitmen transparansi dalam memantau kemajuan upaya APEC atas perwujudan FTAAP serta inisiatif usulan Peru ‘*A new look at the FTAAP*’ yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menyusun rekomendasi dalam melanjutkan pekerjaan FTAAP. Pertemuan juga membahas beberapa inisiatif terkait fasilitasi perdagangan yang sedang berjalan, seperti digitalisasi, rantai pasok, e-commerce, dan *electronic invoicing*. APEC Policy Study Unit (PSU) telah menyusun usulan indikator review *Supply Chains Framework of Action Plan* (SCFAP) III. Pada kesempatan ini, Indonesia menyampaikan paparan keketuaan Indonesia di ASEAN dan meminta dukungan Ekonomi APEC untuk kesuksesan penyelenggarannya.



Gambar 6. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI1 2023

Second Senior Officials Meeting (SOM2)

Pertemuan kedua *Committee on Trade and Investment* (CTI) yang merupakan bagian dari rangkaian SOM2 diselenggarakan pada tanggal 21-22 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Ekonomi APEC menyepakati untuk mengambil langkah bersama untuk mengimplementasikan FTAAP Agenda Work Plan dan menyepakati inisiatif usulan Peru ‘*A new look at the FTAAP*’. Indonesia menekankan pentingnya kerja sama dan pengembangan kapasitas guna mendukung upaya perwujudan FTAAP. Beberapa proposal dan inisiatif terkait fasilitasi perdagangan yang dibahas antara lain mengenai perdagangan digital, SCFAP III, konektivitas rantai pasok dan rantai pasok hijau. Pada kesempatan ini, Indonesia kembali menyampaikan paparan perkembangan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, termasuk KTT ASEAN ke-42 yang berlokasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.



Gambar 7. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bersama Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI2 2023

APEC Ministers Responsible for Trade (MRT)

Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan Ekonomi APEC 2023 berlangsung pada tanggal 25-26 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Isu terkait dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral dan penguatan perdagangan yang berkelanjutan & inklusif menjadi fokus pembahasan diskusi. Dalam hal ini, Indonesia berpandangan pentingnya memperjuangkan kebijakan perdagangan yang adil dan menguntungkan semua pihak termasuk bagi UMKM. Selain itu,

Menteri Perdagangan RI juga menyampaikan agar para pemangku kebijakan dapat menjembatani kesenjangan digital, termasuk melalui peningkatan kapasitas, dengan tetap mendukung ketahanan ekonomi serta menghormati kebijakan domestik masing-masing Ekonomi.



Gambar 8. Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada APEC MRT Meeting 2023

Third Senior Officials Meeting (SOM3)

Pertemuan APEC *Third Committee on Trade and Investment* (CTI3) telah dilaksanakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat (AS) tanggal 13-14 Agustus 2023. Atas permintaan Sekretariat APEC, Indonesia, selaku *permanent Chair* dari anggota ASEAN, menyampaikan perkembangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Indonesia menyampaikan APEC perlu melanjutkan dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral dan menciptakan momentum menuju pertemuan WTO MC13 mendatang. Pembahasan yang berimbang diperlukan dalam upaya realisasi FTAAP. Indonesia juga menyambut perkembangan inisiatif Peru dalam memperbarui pandangan terkait FTAAP. Dukungan juga diberikan terhadap pekerjaan Singapura bersama APEC *Policy Support Unit* (PSU) dalam mengidentifikasi indikator untuk mengevaluasi berbagai inisiatif yang dapat

menyelesaikan hambatan dalam fase ketiga *Supply-Chain Connectivity Framework Action Plan (SCFAP III)*. Pertemuan menyepakati 2 (dua) inisiatif, yaitu: (i) *Action Plan Framework for the 4th Regional Economic Integration Capacity Building Needs Initiative (CBNI)* usulan Korea; dan (ii) *APEC Cooperation Network on Green Supply Chain* usulan RRT. Di sela SOM3, Amerika Serikat juga mengadakan *APEC Digital Month*, yakni agenda rangkaian acara dan kegiatan pada tanggal 29 Juli - 21 Agustus 2023 yang berfokus pada inovasi digital dan teknologi.

APEC Economic Leaders Week (AELW) 2023



Gambar 9. Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Rangkaian AELW 2023

Menteri Perdagangan Republik Indonesia menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri APEC (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-34 pada 14-15 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat. Pada rangkaian pertemuan APEC ini, Menteri Perdagangan turut mendampingi Presiden Republik Indonesia pada KTT APEC yang berlangsung pada 16-17 November 2023. Indonesia menyerukan pentingnya upaya APEC dalam membangun Kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan saling terhubung melalui upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, dukungan terhadap UMKM, serta dukungan terhadap KTM WTO ke-13. Selain pertemuan utama APEC, Menteri Perdagangan juga didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa Ekonomi APEC.

3. Kegiatan Komoditas Internasional

Hasil Pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC)

ITRC merupakan organisasi internasional komoditas karet alam yang dibentuk pada tanggal 12 Desember 2001 dengan beranggotakan 3 (tiga) negara produsen karet alam dunia, yaitu: Thailand, Indonesia, dan Malaysia (TIM). Pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 menghasilkan keputusan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perluasan akses pasar dan perdagangan karet Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Gambar 10. Delegasi Indonesia dalam rangkaian Pertemuan ke-38 ITRC

Dalam rangkaian Pertemuan ke-38 ITRC yang dilaksanakan tanggal 18 - 22 September 2023 di Malaysia, Indonesia mengusulkan agar IRCo menyusun definisi terkait biaya produksi untuk memastikan bahwa informasi dan data yang disampaikan negara - negara anggota memiliki pemahaman yang sama, termasuk definisi smallholders.

Berdasarkan usulan Indonesia, Komite mengidentifikasi smallholders sebagai berikut:

Thailand : kepemilikan lahan 1,5 hingga 2 hektar

Indonesia : kepemilikan lahan dibawah 25 hektar

Malaysia : kepemilikan lahan dibawah atau sama dengan 40 hektar

Selain biaya produksi, TIM juga diminta untuk memberikan informasi alokasi biaya produksi. Indonesia menyampaikan bahwa sebagian besar biaya produksi karet ditanggung oleh petani.

Dalam pertemuan tersebut, turut menyelenggarakan "Seminar on EU Deforestation-Free Regulations and Its Impact on Rubber Industry" dengan menghadirkan 2 narasumber yang berasal dari International Trade Center (ITC) dan perwakilan Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam

sesi diskusi seminar tersebut, Indonesia menyoroti kontribusi karet alam terhadap perekonomian dunia, mata pencaharian petani, dan kelestarian lingkungan, seperti halnya pada tanaman hutan. Indonesia juga menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi sektor karet alam adalah rendahnya harga karet, sehingga peraturan yang memberatkan dapat menghambat kemampuan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Hasil Pertemuan Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)

Keanggotaan Indonesia di ANRPC diharapkan dapat memberikan ruang bagi peningkatan taraf hidup dan kepuasan petani kecil yang menguasai lebih dari 90% kebun karet di Indonesia. Karet Alam Indonesia mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 2,14 Milliar hingga Desember 2023 dan Indonesia menjadi negara produsen terbesar kedua di dunia setelah Thailand.

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan ke-3 Working Group on Sustainable Natural Rubber (WGSNR) tanggal 29 - 31 Agustus 2023 di Palembang. Pada pertemuan ini, Indonesia mengajukan proposal terkait EUDR yang tertuang dalam *Joint Communiqué* sebagai respon ANRPC terhadap kebijakan EUDR. Proposal tersebut diangkat ke level pejabar senior dan kemudian disetujui pada pertemuan komite eksekutif ANRPC tanggal 12 Oktober 2023 di Guwahati, India. Pertemuan tersebut juga mengajak agar *Joint Communiqué* dapat disalurkan melalui berbagai media lokal negara-negara anggota. Selanjutnya, pertemuan menyepakati untuk menyampaikan *Joint Communiqué* tersebut beserta surat kepada European Forest Institute yang menyatakan maksud ANRPC untuk melakukan dialog dengan Komisi Eropa.



Gambar 11. Delegasi Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Tahunan ANRPC di Guwahati, India

Pada tahun 2023, Indonesia turut menjadi panelis pada Annual Rubber Conference (ARC) yang diadakan secara luring pada tanggal 9 Oktober 2023 di India dengan tema “*Natural Rubber Industry: Challenges and Policy Option in the 21st Century*”. Konferensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah di perkebunan karet, menekan biaya produksi, serta mengeksplorasi

potensi sumber pendapatan tambahan dari karet alam. Selain itu, konferensi ini memberikan informasi mengenai perkembangan industri karet global untuk mendukung formulasi kebijakan yang berkelanjutan bagi sektor karet alam. Indonesia sebagai salah satu negara anggota menjadi panelis pada sesi diskusi:

- a. *“Sustainable NR supply: Challenges and Solutions”*, yang bertujuan untuk menyajikan paparan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan karet alam yang berkelanjutan.
- b. *“Measures to improve the NR Prices and Domestic Demands: Country Experiences”*, yang bertujuan untuk menyajikan paparan mengenai peran pemerintah, industri, dan konsumen dalam memperbaiki harga karet.

Hasil Pertemuan International Coconut Community (ICC)

Sejak tahun 1976, kantor Sekretariat ICC berbasis di Jakarta dan dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Sebagai salah satu anggota pendiri ICC, Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif strategis di dalamnya. Ini termasuk menjadi anggota Technical Working Group yang merupakan tim inti penyusunan kebijakan di ICC; mendukung penyediaan data statistik; dan menjadi *host country* Sekretariat ICC. Saat ini, posisi Direktur Eksekutif ICC dipegang oleh perwakilan Indonesia, yang membantu meningkatkan pengaruh dan visibilitas Indonesia dalam ICC.

Kementerian Perdagangan selaku instansi penjuru berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh ICC diantaranya pada pelaksanaan International Coconut Oil Conference. Pada konferensi tersebut beberapa poin penting dibahas, termasuk perlunya penelitian yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung kampanye positif produk minyak kelapa serta pengembangan produk inovatif dari minyak kelapa dengan harapan dapat melengkapi rantai pasokan yang ada dan memberikan manfaat ekonomi serta kesehatan yang lebih baik. Kemudian, pada International Seminar on Carbon Sequestration and Carbon Credit menyoroti peran kredit karbon sebagai insentif ekonomi untuk pengurangan emisi serta percepatan pengembangan dan peremajaan tanaman kelapa untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa dengan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 12. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada Sesi Tahunan ke-59/Pertemuan Tingkat Menteri ICC di Bandar Lampung

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam Sesi Tahunan ke-59/Pertemuan Tingkat Menteri Komunitas Kelapa Internasional (International Coconut Community/ICC) di Bandar Lampung pada 5 - 7 Desember 2023. Sesi Tahunan ke-59 ICC dibuka oleh Menteri Perdagangan RI dan dihadiri oleh perwakilan 15 negara anggota ICC termasuk Menteri Pariwisata, Perdagangan, Industri, dan Koperasi Kiribati dan Wakil Menteri Pertanian dan Perikanan Samoa, serta perwakilan organisasi internasional.

Pada Pertemuan Sesi Tahunan ke-59 ICC, Indonesia menyampaikan laporan negara mengenai situasi kelapa dan industri kelapa di Indonesia. Indonesia juga berperan aktif dalam merevisi Rencana Strategis lima tahun ICC, dengan fokus pada pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menekankan keterlibatan perempuan dan anak muda dalam sektor kelapa.

Bergabungnya Pantai Gading sebagai anggota baru diharapkan akan meningkatkan posisi tawar negara-negara anggota ICC dalam industri kelapa. Indonesia juga mendukung Papua Nugini sebagai penyelenggara Hari Kelapa Sedunia tahun 2024, yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program PBB sebagai upaya meningkatkan pemahaman global akan pentingnya kelapa dalam kehidupan sehari-hari serta mengapresiasi kontribusinya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Pertemuan International Coffee Organization (ICO)

Indonesia merupakan salah satu negara dari kawasan Asia, bersama dengan India, yang telah menjadi bagian dari ICO sejak International Coffee Agreement (ICA) 1962 dengan status *acceptance*. ICO selanjutnya berjalan dengan berlandaskan kepada ICA 1968, ICA 1976, ICA 1983, ICA 1994, ICA 2001, dan ICA 2007. Sebagai informasi, ICA 2007 akan digantikan dengan ICA 2022, yang penyusunannya dilatarbelakangi oleh pandangan negara anggota ICO bahwa fungsi ICO saat ini tidak lagi relevan dengan situasi aktual sektor kopi

global. Penyusunan ICA 2022 juga bertujuan untuk mendukung reformasi organisasi dan mengakomodir isu-isu baru di sektor kopi, khususnya terkait agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Pada perkembangannya, ICA 2022 kemudian disepakati pada Pertemuan Dewan ICO Sesi Khusus ke-133 tanggal 8 – 9 Juni 2022. Sehubungan dengan hal ini, Indonesia telah melakukan penandatanganan ICA 2022 pada tanggal 8 Maret 2023 di kantor Sekretariat ICO di London, Inggris. Adapun saat ini Indonesia sedang menempuh proses ratifikasi atas ICA 2022 yang diharapkan dapat selesai sebelum tanggal 31 Juli 2025.

Pertemuan Dewan ICO yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 menghasilkan keputusan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perluasan akses pasar dan perdagangan kopi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu sebagai berikut:

- Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-135



Gambar 13. Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-135 tanggal 30 Maret 2023 secara virtual

Pada Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-135 tanggal 30 Maret 2023, beberapa agenda dibahas, termasuk keanggotaan pada ICA 2022 dan persiapan implementasi ICA 2022 dengan pembentukan working group. Indonesia ikut terlibat dalam nota kesepahaman baru antara ICO dan ILO Vision Zero Fund (VZF) serta dalam deklarasi bersama dengan ASEAN Coffee Federation (ACF) untuk mendukung sektor kopi yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga turut dalam upaya ICO dan CPPTF dalam menyusun policy brief dengan University of Wageningen untuk menyoroti definisi spesifik regulasi Uni Eropa tentang hutan dan perkebunan.

- Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-136 dan WCC ke-5

Pada Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-136 dan WCC ke-5 di Bengaluru, India, Indonesia terlibat dalam beberapa agenda utama. Salah satunya adalah diskusi tentang keuangan ICO, di mana Indonesia meminta agar alokasi dana diprioritaskan pada program yang bermanfaat bagi negara produsen, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, Indonesia juga ikut terlibat dalam pembahasan terkait distribusi hak suara dan peningkatan kontribusi keuangan untuk tahun

2023/24. Hingga September 2023, sebanyak 13 negara telah menandatangani ICA 2022, terdiri dari 12 negara eksportir dan 1 negara importir. Dengan mempertimbangkan jumlah negara penandatangan, pertemuan menyepakati Resolusi perpanjangan jangka waktu penandatangan ICA 2022 sampai dengan 30 April 2025 dan jangka waktu instrumen ratifikasi, *acceptance*, atau *approval* sampai dengan 31 Juli 2025. Pertemuan menyepakati Resolusi Perpanjangan ICA 2007 sebagai dasar hukum ICO hingga Februari 2026 dengan mempertimbangkan proses *entry into force* dan proses ratifikasi ICA 2022 di masing-masing negara yang memakan waktu relatif lama. Selain itu, nominasi GAEKI sebagai perwakilan sektor swasta Indonesia dalam Private Sector Consultative Board (PSCB) periode 2023/24 dan 2024/25 juga telah disepakati.

Hasil Pertemuan International Pepper Community (IPC)

Keanggotaan Indonesia di IPC didasarkan kepada Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1971 tentang Mengesahkan *“Agreement Establishing Pepper Community” sebagai Hasil Inter Governmental Consultations of Regional Cooperation in Pepper in Asia”*. Tidak hanya sebagai anggota penuh, Indonesia juga memiliki kedudukan penting pada IPC sebagai salah satu pendiri.

Sebagai salah satu pendiri IPC, Indonesia melakukan berbagai inisiatif strategis di IPC, antara lain sebagai pengagas peninjauan kembali *Agreement Establishing the International Pepper Community* untuk melihat korelasinya dengan kondisi terkini; sebagai inisiatif pengaktifan kembali IPC *Interlaboratory Proficiency Testing Programme* yang bertujuan memberi pelatihan untuk peningkatan mutu; mendukung penyediaan data statistik yang lebih akurat oleh Sekretariat IPC; serta merevisi IPC Method of Sampling for Chemical Analysis yang telah diselaraskan dengan CODEX dan ASTA.

Kementerian Perdagangan selaku instansi penjuru berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh IPC diantaranya:

- Pertemuan ke - 12 Komite Research & Development (R&D) IPC, 19 Juni 2023

Pertemuan ke-12 Komite R&D IPC dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada Juni 2023 membahas progres hasil Pertemuan ke-11, termasuk pelaksanaan pelatihan back-to-back dengan Pertemuan Komite R&D IPC yang diusulkan Malaysia tanpa biaya tambahan. Selain itu, pembahasan mengenai Proyek Ketelusuran Lada IPC termasuk masukan dari Indonesia dan Malaysia untuk draf MoU yang direncanakan ditandatangani pada Pertemuan Tahunan IPC di Malaysia pada November 2023. Laporan anggota Komite R&D mencakup isu biaya produksi lada dari beberapa negara, dengan biaya produksi lada Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD 3,28/kg untuk lada hitam dan USD 3,43/kg untuk lada putih.

- Pertemuan ke-9 Komite Pemasaran IPC, 21 - 22 Agustus 2023.

Pertemuan ke-9 Komite Pemasaran IPC di Ho Chi Minh City, Vietnam pada Agustus 2023 membahas beberapa agenda, termasuk progres produksi video profil IPC, laporan statistik lada negara anggota, serta laporan penolakan pengiriman lada oleh Uni Eropa akibat residu pestisida, sementara Vietnam dan India dari Amerika Serikat karena kontaminasi dan Salmonella. Sekretariat IPC mengusulkan promosi pasar lada di Tiongkok dan Timur Tengah, termasuk melalui penyelenggaraan pameran rempah internasional atau joint booth, dengan Indonesia mengusulkan pertimbangan keuntungan dan kelemahan dalam joint booth. Selain itu, Sekretariat IPC akan mengembangkan alat analisis statistik perdagangan lada untuk menampilkan kinerja perdagangan bulanan masing-masing negara berdasarkan kode HS.

- Pertemuan ke-29 Komite Mutu IPC, 11 - 12 Oktober 2023.

Tahun 2023, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah sekaligus Chairman untuk Pertemuan ke-29 Komite Mutu IPC yang diselenggarakan pada tanggal 11 – 12 Oktober 2023 di Purbalingga, Jawa Tengah. Posisi Indonesia sebagai Chairman berdampak pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan kepentingan nasional pada sektor lada. Pertemuan ke-29 Komite Mutu membawa kesuksesan bagi Indonesia dalam menyoroti prestasinya dalam memperkuat kapasitas dan kualitas lada. Indonesia berhasil menyampaikan kemajuan dalam regulasi kualitas lada nasional serta implementasi program monitoring lada yang mencapai standar IPC. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan program penguatan kapasitas lada mengenai produktivitas dan nilai tambah. Selain pencapaian dalam pemantapan mutu lada, Indonesia juga akan melaksanakan *Proficiency Testing Program* tahun 2024 dengan menggunakan parameter: i) *moisture*, ii) *volatile oil*, iii) *piperine*, iv) *total ash*, v) *acid insoluble ash*, dan vi) *pesticide residue*.

Lebih lanjut, sekretariat IPC menyampaikan hasil survei lapangan di perkebunan lada Indonesia mengenai penggunaan tanaman stek batang, yang tidak umum di negara-negara anggota IPC lainnya. Perlu uji lebih lanjut apakah penggunaan tanaman malada untuk mencegah kebusukan pangkal batang pada lada layak dikembangkan untuk menjaga kualitas mutu lada dalam jangka panjang.

- Pertemuan Eksekutif ke-51 Heads of Delegations (HoD) IPC, 6 November 2023.



Gambar 14. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Pertemuan Eksekutif ke-51 HoD IPC di Kuching, Malaysia

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan survei penggunaan IPC Farmers' App dan pelatihan untuk petani, yang diakomodasi dalam program kegiatan tahun 2024. Pertemuan juga mengumumkan pemenang *IPC Best Award 2023* dari masing-masing negara. Untuk Indonesia, kategori Excellence in Export of Value-Added Pepper Products dimenangkan oleh PT Billiton Rempah Indonesia (Billiton Spice), sedangkan kategori Best Pepper Farmer dimenangkan oleh Bapak Niyatono dari Kalosi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Di samping itu, Indonesia turut aktif dalam diskusi mengenai perpanjangan masa jabatan DE IPC dan Asisten IT, serta menolak proposal relokasi kantor Sekretariat IPC dari Jakarta ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Penolakan tersebut juga didukung oleh beberapa negara anggota lainnya, termasuk India, Malaysia, dan Sri Lanka. Indonesia memandang relokasi tersebut dapat mengganggu fokus kerja IPC dan mendukung upaya untuk menjaga keberlanjutan sektor lada. Vietnam akan mengirimkan proposal komprehensif mengenai relokasi ke negara-negara anggota IPC untuk dibahas secara internal sebelum mengambil keputusan di tingkat pemerintah (*Government to Government. G2G*)

4. Kegiatan di Forum D8/OKI

Trade Preferential System among the Member States of the Organisation of Islamic Cooperation (TPS-OIC)

TPS-OIC merupakan perjanjian preferensi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara anggota OKI yang terdiri atas 57 negara anggota. 18 negara telah meratifikasi seluruh dokumen TPS-OIC dan 14 negara yang telah meratifikasi dokumen dan menyerahkan *concession list* (as of November 2020). Dalam TPS-OIC terdapat tiga dokumen perjanjian, yaitu

- Framework Agreement, berlaku 2002, Indonesia meratifikasi pada 20 Mei 2011
- The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) berlaku 2010, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi)
- The Rules of Origin (RoO) berlaku 2011, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi).

Dalam rangka ratifikasi dokumen PRETAS dan ROO, Indonesia telah berkonsultasi dengan Sekretariat OIC melalui surat elektronik pada tanggal 5 September 2023 untuk mendapatkan konfirmasi atas beberapa hal sebagai berikut:

- Pemanfaatan skema TPS-OIC dalam hubungan perdagangan intra-OKI sejak mulai implementasi tanggal 1 Juli 2022;
- Tarif yang digunakan sebagai basis (base rate) dalam penyusunan daftar konsesi penurunan tarif (concession list);
- Update daftar konsesi penurunan tarif (concession list) yang telah disampaikan oleh negara anggota kepada Sekretariat OKI.

Preferential Trade Agreement Among Developing Eight Countries (PTA D-8)

Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States (PTA D-8) merupakan kerja sama penurunan tarif dalam rangka peningkatan hubungan perdagangan yang melibatkan 8 (delapan) negara, yaitu: Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Turki, Nigeria, Iran dan Mesir. Negara-negara anggota D-8 menandatangani kesepakatan PTA D-8 pada tahun 2006 selain untuk meningkatkan hubungan perdagangan, juga untuk meningkatkan integrasi ekonomi.

Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi PTA D-8 dengan menerbitkan sejumlah peraturan yaitu:

- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan tariff Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8, ditetapkan dan diundangkan tanggal 29 Desember 2021 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States), diundangkan dan ditetapkan tanggal 30 Maret 2022 dan berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan;
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Preferential Trade

Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8), ditetapkan tanggal 21 April 2022.

Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi PTA D-8 dan telah mengirimkan notifikasi kepada Sekretariat D-8 melalui nota diplomatik tanggal 21 November 2022. Penyampaian notifikasi juga dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, yaitu Gazette Notification, daftar konsesi produk (HS 2022), contact points untuk issuing authority maupun receiving authority, spesimen SKA, dan spesimen tandatangan serta stempel pejabat penerbit SKA.

Sebanyak 5 negara telah melakukan notifikasi proses ratifikasi PTA D-8, yaitu Indonesia (2022), (2022), Iran (2016), Malaysia (2013), dan Turkiye (2011). Tanggal 31 Oktober 2022 telah disepakati sebagai cut-off date implementasi D-8 PTA, namun keputusan tersebut harus memperoleh persetujuan Supervisory Committee (SC). Pertemuan The 7th Meeting of the Supervisory Committee (SC) D-8 PTA dan The 3rd Trade Ministers Council (TMC) D-8 yang semula dijadwalkan tanggal 17 – 18 Juli 2023 di Dhaka, Bangladesh, akhirnya ditunda karena tidak memenuhi kuorum konfirmasi peserta. Sekretariat D-8 berencana akan kembali menyelenggarakan pertemuan 7th SC dan 3rd TMC secara fisik yang dijadwalkan tanggal 4-5 Maret 2024 di Dhaka, Bangladesh.

COMCEC Project Funding

COMCEC Project Funding (CPF) adalah mekanisme pembiayaan yang diprakarsai oleh COMCEC Coordination Office (CCO) sejak tahun 2013. CCO memberikan kesempatan bagi negara anggota yang aktif terlibat dalam *working group* untuk membuat/mengajukan proyek dan implementasi dari proyek tersebut dibiayai melalui pembiayaan hibah dari COMCEC Coordination Office (CCO).

Adanya *COMCEC Project Funding* ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Negara-negara Anggota dalam merealisasikan Policy Recommendation yang diadopsi pada COMCEC Ministerial Sessions agar berjalan efektif.

Pada Oktober 2023 Kemendag kembali mengajukan beberapa proposal kegiatan dan salah satu proposal usulan Indonesia yang berjudul *“Developing Product Information and Determining Halal Critical Points”* berhasil terpilih untuk mendapatkan pendanaan CPF periode implementasi 2024. Proyek kegiatan terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu *Training* dan *Study Visit* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Halal. Dalam pelaksanaannya tahun 2024, Dit. PAKOI akan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional (Kemendag) dan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (BSN).

5. Kegiatan G20 dan Organisasi Internasional Lainnya

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) didirikan oleh PBB pada 1964, sebagai wadah mendiskusikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama mengingat organisasi internasional yang terbentuk (IMF, World Bank, GATT/WTO) dianggap tidak mewakili aspirasi negara-negara berkembang. Pada awal pembentukannya, UNCTAD fokus pada peningkatan daya saing ekspor negara-negara berkembang. Seiring berjalannya waktu, cakupan kerja UNCTAD diperluas, di antaranya meliputi investasi, ekonomi digital, persaingan usaha, logistik, transportasi, teknologi dan lain-lain. Melalui pertemuan dengan negara anggotanya UNCTAD mengidentifikasi dan menyepakati proyek-proyek *capacity building*, bantuan teknis, riset, penyusunan laporan, dan rekomendasi kebijakan.

UNCTAD memiliki agenda pertemuan utama, antara lain:

1. **UNCTAD Conference**; Pertemuan tingkat Menteri negara anggota UNCTAD setiap 4 tahun yang menyepakati arah dan visi UNCTAD untuk jangka waktu 4 tahun ke depan. (PTM terakhir diselenggarakan pada 2021 di Barbados. PTM selanjutnya akan diadakan pada tahun 2024)
2. **Trade and Development Board**; pertemuan yang diselenggarakan minimal satu tahun sekali untuk mendiskusikan rencana program dan anggaran UNCTAD sebagai implementasi dari Conference. Indonesia dalam pertemuan ini diwakili oleh PTRI Jenewa.
3. **Working Party**; Membahas aspek teknis implementasi program dan anggaran. Bertemu 3 – 5 kali dalam setahun.
4. **Comissions**; pertemuan badan khusus UNCTAD atau UN (ECOSOC) untuk membahas isu-isu tertentu untuk jangka waktu tertentu. Commission yang masih aktif pada 2023 adalah Commission on Science and Technology for Development (CSTD)
5. **Intergovernment Group of Experts (IGE)**; pertemuan tingkat pakar yang membahas isu-isu khusus seperti IGE on E-Commerce and Digital Economy, IGE on Consumer Protection Law and Policy, IGE on Competition Law and Policy, Multi-Year Expert Meeting on Trade, Services and Development dan lain-lain.
6. **Flagship Events**; pertemuan berskala besar yang mengundang *high-level speakers* dan berbagai pemangku kepentingan antara lain UNCTAD e-Week (sebelumnya bernama eCommerce Week), World Investment Forum dan Trade Policy Dialogue.

Delegasi Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi pada Pertemuan Sesi ke-7 Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Consumer Protection Law and Policy, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) di

Jenewa, Swiss, 3-4 Juli 2023. Pertemuan membahas beberapa agenda terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain perkembangan implementasi United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP).

Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia aktif menyampaikan beberapa intervensi atas, antara lain:

- 1) Building trust in digital markets through enhanced consumer protection on online platforms, Indonesia telah memiliki pengaturan terkait hak-hak konsumen dalam transaksi melalui digital platform (e-commerce) serta telah menerbitkan UU tentang perlindungan data pribadi. Indonesia juga menyampaikan perkembangan pembangunan sistem Online Dispute Resolution (ODR).
- 2) Product safety, Perlunya memastikan kemanan produk yang diperdagangkan melalui digital platform, yang implementasinya melibatkan multi-stakeholders. Salah satu bentuk dapat mendorong peningkatan keamanan produk adalah dengan memberikan penghargaan keamanan produk diharapkan dapat mendorong kesadaran sektor swasta mendukung pentingnya keamanan produk. Saat ini juga sedang dikembangkan sistem informasi terkait keamanan produk non pangan.
- 3) Consumer protection and the transition to clean energy. Indonesia menyampaikan bahwa dalam rangka mencapai target net zero emission pada tahun 2060, Indonesia menjalankan beberapa strategi kebijakan, antara lain: retirement PLTU secara bertahap, percepatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) terutama pembangkit tenaga surya dan bayu, dan mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik dan kompor listrik. Pelaksanaan transisi energi perlu memperhatikan kepentingan konsumen, misalnya dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan harga produk serta penyesuaian yang perlu dilakukan oleh konsumen.
- 4) Digital Online Dispute Resolution for Consumer Protection (DODR), Indonesia sampaikan apresiasi atas kerja sama dengan UNCTAD dan sampaikan evaluasi terkait pentingnya asesmen dan validasi dalam pelaksanaan technical assistance UNCTAD yang menggunakan pendanaan eksternal.

G7 TRADE MINISTERS MEETING (TMM)

Indonesia diundang untuk pertama kalinya dalam Pertemuan G7 TMM sebagai negara mitra dimana Indonesia menghadiri 2 (dua) sesi utama yaitu: i) *Outreach Session*, dengan agenda Peningkatan Ketahanan Rantai Pasok dan Kemitraan antara Sektor Publik dan Swasta; dan ii) *Working Dinner*, membahas topik Perdagangan Berkelanjutan, Kelestarian Lingkungan, Aspek Pembangunan, Digital, dan isu prioritas Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO.

Pertemuan dipimpin oleh Yoko Kamikawa, Menteri Luar Negeri Jepang dan Yasutoshi Nishimura, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, Jepang. Pertemuan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota G7, negara mitra yaitu

Indonesia, Australia, India, Chile, Kenya serta Organisasi Internasional (WTO, OECD, dan ERIA). Jepang juga mengundang sektor bisnis terkemuka dunia seperti Kaidanren, Canpotex, Siemens Energy, Suzuki, JOHMEC, Rio Tinto dan Coherent.

Dalam *Outreach Session*, Seluruh negara G7 dan mitra termasuk Indonesia sepakat bahwa rantai pasok yang lebih terdiversifikasi merupakan jalan untuk ketahanan rantai pasok global. Keterlibatan sektor swasta melalui inovasi dan kolaborasi dengan sektor publik dipandang dapat mendukung upaya tersebut. Indonesia menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi dalam menghasilkan nilai tambah dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, sektor bisnis juga menyampaikan rekomendasi pentingnya kolaborasi dan kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam memperkuat rantai pasok global.

Dalam *Working Dinner*, negara anggota G7 menyampaikan Penguatan rantai pasok global khususnya pada *critical raw material* perlu menjadi fokus utama untuk mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik dalam upaya transisi menuju energi bersih terbarukan.

Indonesia menyampaikan bahwa seluruh negara perlu memastikan kebijakan terkait kelestarian lingkungan tidak menjadi hambatan terselubung dalam perdagangan serta mendorong berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa sebagai prioritas utama agenda reformasi WTO serta penyelesaian perundingan yang telah dimandatkan pada KTM WTO sebelumnya yang mencakup solusi permanen *public stockholding*, pengecualian hak kekayaan intelektual untuk diagnosis dan terapi COVID-19, perjanjian subsidi perikanan tahap dua serta perpanjangan moratorium bea masuk transmisi elektronik.

Analisis Penyebab Keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 1

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan memerlukan peran yang optimal dari masing-masing fungsi baik substansi maupun logistik. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kegiatan antara lain: kesesuaian topik atau isu strategis yang diangkat dengan peserta dan narasumber, komunikasi dan koordinasi yang baik secara internal penyelenggara maupun dengan K/L terkait, fasilitas dan pengelolaan logistik yang berkualitas baik, ketepatan alokasi waktu dan alur kegiatan, dan lain-lain.

Penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan lancar dengan didukung oleh perangkat logistik maupun sumber daya manusia yang memadai. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan diantaranya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang memadai, relevansi topik atau isu strategis yang diangkat dengan kebutuhan konstituen domestik, koordinasi yang tepat antar Kementerian/Lembaga yang efektif dalam menentukan posisi nasional pada setiap kegiatan di forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional menjadi faktor penting dalam rangka percepatan penyelesaian perundingan.

Sasaran Program 2

Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 2:

Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Cara Perhitungan:

$$D_t = \frac{\sum D_j}{\sum E_j} \times 100$$

D_t = Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

D_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

E_{jt}= Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi tahun 2023 lebih tinggi di mana pada tahun 2022 realisasi IK-5 sebesar 80 persen sedangkan di tahun 2022 sebesar 100 persen. Dengan demikian capain di tahun 2023 adalah lebih besar dibanding dengan capaian di tahun 2022, di mana capaian tahun 2022 sebesar 100 persen dan capaian tahun 2023 sebesar 107,1 persen. Terdapat 18 proposal dari 21 proposal (dari 4 tim) yang diterima. Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024, maka realisasi dan capaian indikator kinerja kedua mengalami kenaikan.

Indikator Kinerja kedua (IK-2) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan DPAKOI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi dibeberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja DPAKOI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan.

Pada tahun 2023, Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional lainnya dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	85.7	107.1	80	86.7	108.3

Sumber: DPAKOI (2024)

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pencapaian IK-2 diantaranya sebagai berikut:

- efektifnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan substansi dalam deklarasi dan statement sesuai dengan kepentingan nasional;
- konsistensi dan dukungan Kementerian/Lembaga dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
- kesamaan pandangan dalam menyuarakan dan mendorong inisiatif yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional;

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Telah melakukan upaya untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan di fora APEC dan Organisasi Internasional. Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain:

APEC Minister Responsible for Trade (MRT) 2023

Menteri Perdagangan memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Menteri Perdagangan APEC ke-29 tanggal 25-26 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat.

Terdapat 2 (dua) kegiatan dalam pertemuan tingkat menteri ini, yaitu Pertemuan Pleno APEC MRT 2023 dan Jamuan Makan Siang dengan Pemangku Kepentingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun Pertemuan Pleno APEC MRT 2023 membahas 2 (dua) agenda utama, yaitu Dukungan

terhadap Sistem Perdagangan Multilateral dan Mendorong Perdagangan yang Berkelanjutan dan Inklusif di Kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan pentingnya peran APEC dalam mendorong reformasi WTO khususnya penyelesaian krisis di Badan Banding WTO. APEC dapat mendukung negosiasi substantif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian, subsidi perikanan, jasa, serta isu-isu baru seperti ekonomi digital, fasilitasi investasi dan UMKM.

Indonesia menegaskan Anggota APEC perlu bekerja sama mendorong kebijakan perdagangan berkelanjutan dan inklusif di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks, serta mendorong pemulihian ekonomi yang lebih baik melalui transisi ekonomi hijau dan transformasi digital.

Pada pembahasan kesepakatan bersama APEC MRT, pertemuan tidak mencapai konsensus pada paragraf 4 terkait isu geopolitik Rusia dan Ukraina yang dirujuk dari APEC 2022, sehingga hanya menghasilkan *“The 2023 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair”*.

Di sela-sela pertemuan APEC MRT, Menteri Perdagangan melakukan pertemuan bilateral dengan Kanada, Peru, Selandia Baru, Jepang, Chile, dan Australia membahas isu-isu strategis untuk meningkatkan kinerja perdagangan. Selain itu Menteri Perdagangan juga menyaksikan penandatangan MoU antara PT Borine Technology Indonesia dengan Hamilton Beach Amerika Serikat.

APEC Ministerial Meeting (AMM) 2023

Menteri Perdagangan bersama Menteri Luar Negeri memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri APEC (*APEC Ministerial Meeting/AMM*) ke-34 di San Francisco tanggal 14-15 November 2023. Agenda utama pertemuan meliputi (i) menciptakan lingkungan yang inovatif demi mewujudkan masa depan yang adil, berkelanjutan dan inklusif; dan (ii) membangun kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan saling berhubungan melalui peningkatan kesejahteraan Ekonomi.

Pada kesempatan ini, Indonesia menyampaikan kecaman terhadap serangan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata serta bantuan kemanusiaan. Dalam menghadapi KTM WTO ke-13 mendatang, Menteri Perdagangan mendorong anggota APEC melakukan tindakan nyata dalam melakukan reformasi WTO, khususnya pengembalian fungsi badan penyelesaian sengketa, penyelesaian isu pertanian (*Public Stockholding*), menyepakati kesepakatan subsidi perikanan yang berimbang dengan elemen special and differential treatment (SDT), perluasan TRIPS waiver agar mencakup *Diagnostics* dan *Therapeutics*, dan penghentian moratorium bea masuk transmisi elektronik. Menteri Perdagangan menunjukkan keberhasilan Indonesia pada deforestasi dan pemberdayaan perempuan dan

UMKM serta menyampaikan beberapa prioritas Indonesia dari Keketuaan ASEAN 2023, termasuk upaya mendukung SDGs.

Pertemuan berhasil menyepakati “*Joint Ministerial Statement - AMM 2023*” yang menegaskan kembali komitmen reformasi WTO, integrasi ekonomi di kawasan, mengatasi hambatan rantai pasok, menjembatani kesenjangan digital dan fasilitasi arus data, peningkatan partisipasi UMKM dalam rantai nilai global, transisi energi, isu lingkungan dan keberlanjutan, pemberdayaan perempuan, serta berbagai kesepakatan di level sektoral.

Menteri Perdagangan juga melakukan pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, Australia dan Kanada. Dan melakukan Audiensi dengan CEO YouTube.

Selama tahun 2023, di forum APEC **sebanyak 20 dari total 24 usulan Indonesia telah diterima dalam statement tingkat Menteri dan Pemimpin Ekonomi APEC**. Beberapa usulan tersebut antara lain:

Tabel 10. Masukan Indonesia yang Diterima pada Statement of the Chair - Ministers Responsible for Trade Meeting 2023

Masukan Indonesia yang Diterima	
Statement of the Chair - Ministers Responsible for Trade Meeting 2023	
Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral	Indonesia mengajukan perubahan frasa “ <i>APEC Members</i> ” menjadi “ <i>Respective APEC Member participants</i> ” dalam kalimat terkait JSI WTO yang sudah diakomodir dalam Chair’s statement.
	Usulan Indonesia untuk menambahkan frasa “ <i>food systems</i> ” dan mengubah frasa “ <i>food security</i> ” menjadi “ <i>food insecurity</i> ” diterima. Usulan perubahan frasa dimaksud merujuk ke salah satu outcome document pertemuan WTO MC12 “ <i>The Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity</i> ”.
Environmental Goods (EGs)	Indonesia menekankan pentingnya penambahan kalimat instruksi untuk memulai pekerjaan kerangka diskusi APEC <i>Reference List EGs</i> usulan Australia sesuai dengan rekomendasi yang disepakati di tingkat kelompok kerja, Untuk itu, usulan penambahan

	frasa " <i>in accordance with the agreed recommendations</i> " berhasil masuk dalam Chair's statement.
Inklusivitas	Indonesia mengusulkan untuk menambahkan elemen pengembangan kapasitas pada isu inklusivitas
Free Trade Area of the Asia Pasific (FTAAP)	Indonesia mengusulkan untuk mengganti frasa " <i>high standard</i> " menjadi " <i>high quality</i> " pada kalimat pekerjaan FTAAP. Hal ini sesuai dengan mandat Pemimpin Ekonomi APEC di tahun 2022 dan untuk menghindari pembahasan menetapkan standar dalam perjanjian regional dalam perundingan lain seperti IPEF.
Ekonomi Digital	Indonesia mengusulkan untuk menambahkan elemen " <i>digital infrastructure</i> " untuk menjembatani kesenjangan digital.
	Indonesia mengusulkan untuk menghapus elemen " <i>free</i> " dan " <i>with trust</i> " pada kalimat terkait fasilitasi arus data dan informasi.
Perjanjian fasilitasi perdagangan (Trade Facilitation Agreement) WTO	Indonesia mengajukan penghapusan daftar sub-artikel WTO TFA terkait upaya tanggap bencana dan pemulihan.

Tabel 11. Masukan Indonesia yang Diterima pada Joint Ministerial Statement – 34th APEC Ministerial Meeting 2023

Joint Ministerial Statement – 34th APEC Ministerial Meeting 2023	
Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral	Indonesia mempertahankan keselarasan pernyataan terkait isu subsidi perikanan dengan hasil WTO MC12.
Inklusivitas	Indonesia mengusulkan dan mempertahankan frasa " <i>as appropriate</i> " tetap disebutkan setelah frasa " <i>Indigenous Peoples</i> "
Sustainability & Inclusivity	Indonesia mempertahankan agar komitmen <i>Fossil Fuel Subsidy Reform</i>

	(FFSR) selaras dengan komitmen sebelumnya.
	Indonesia mengusulkan untuk menghapus frasa terkait moratorium bea masuk transmisi elektronik (<i>moratorium on custom duties on electronic transmissions/CDET</i>) dalam pernyataan.
Ekonomi Digital	Indonesia mengusulkan untuk menambahkan elemen " <i>digital infrastructure</i> " untuk menjembatani kesenjangan digital.

Tabel 12. Masukan Indonesia yang Diterima pada 30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Golden Gate Declaration

30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Golden Gate Declaration	
Inklusivitas	Indonesia mengusulkan dan mempertahankan frasa “ <i>as appropriate</i> ” tetap disebutkan setelah frasa “ <i>Indigenous Peoples</i> ”
Sustainability & Inclusivity	Indonesia mengusulkan elemen UMKM sebagai salah satu kelompok yang diberdayakan dalam upaya mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan berketahanan.
Ekonomi Digital	Indonesia mengusulkan untuk menghapus mengganti frasa “ <i>on facilitating the free flow of data</i> ” menjadi “ <i>to facilitate cross-border data flows</i> ” untuk menghindari penggunaan frasa “ <i>free flow of data</i> .” Indonesia dapat menerima penggunaan frasa yang disepakati, yaitu “ <i>cooperate on facilitating the flow of data</i> ”.

Tabel 13. Masukan Indonesia yang Diterima pada 30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Annex: San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy

30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Annex: San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy	
Environmental Goods (EGs)	Mengusulkan penyelarasan komitmen terkait <i>Environmental goods</i> dengan <i>Bangkok Goals on BCG Economy</i>

Sustainability & Inclusivity	Indonesia mengusulkan prinsip keseimbangan dalam target pilar sosial, ekonomi dan lingkungan
	Indonesia mengusulkan frasa " <i>In accordance with economies' laws and regulations</i> " dalam poin terkait konsultasi dan publikasi informasi
	Indonesia mengusulkan prinsip keseimbangan dalam target pilar sosial, ekonomi dan lingkungan

Tabel 14. Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir

Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir	
Statement of the Chair - Ministers Responsible for Trade Meeting 2023	
Sustainability	Indonesia mengusulkan untuk tidak memasukkan isu <i>fossil fuel subsidies reform</i> (FFSR) karena baru diajukan pasca draft kedua disirkulasi yang juga sejalan dengan posisi Vietnam. Namun, Ekonomi Anggota akhirnya dapat menyepakati masuknya komitmen isu FFSR tersebut karena sebelumnya telah disepakati pada APEC Leaders Declaration 2010.
Perjanjian fasilitasi perdagangan (Trade Facilitation Agreement) WTO	Indonesia mengusulkan penambahan elemen rujukan ke regulasi domestik terkait provisi WTO TFA untuk tanggap bencana dan pemulihan yang disampaikan pada saat intersesi sebelum <i>drafting session</i> dimulai.
30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Golden Gate Declaration	
Ekonomi Digital	Indonesia mengusulkan penghapusan frasa " <i>including in the areas of digital assets and payments, data privacy, cloud computing, telecommunications networks, cybersecurity, digital health and telehealth, e-commerce, and emerging technologies such as</i>

	<p><i>artificial intelligence.</i>" pada area digitalisasi dalam upaya percepatan implementasi AIDER. Indonesia akhirnya dapat menerima dengan kompromi hanya mencantumkan area digitalisasi yang telah intensif dibahas di APEC, sehingga frasa berubah menjadi "<i>data privacy, cloud computing, telecommunications networks, promoting interoperability, ICT security, and digital trade and e-commerce, emerging technologies, and promoting innovation and adoption of enabling technologies and services.</i>"</p>
<p>30th APEC Economic Leaders' Meeting 2023 - Annex: San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy</p>	
Sustainability & Inclusivity	Indonesia mengusulkan elemen dampak lingkungan pada data analisa ekonomi yang akan dieksplorasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Dokumen statement tingkat Menteri dan Pemimpin Ekonomi APEC 2023, dapat diakses pada link sebagai berikut:

http://mddb.apec.org/Documents/2023/MM/MRT/23_mrt_jms.pdf

http://mddb.apec.org/Documents/2023/MM/AMM/23_amm_jms.pdf

http://mddb.apec.org/Documents/2023/AELM/AELM/23_aelm_dec.pdf

http://mddb.apec.org/Documents/2023/AELM/AELM/23_aelm_dec_anx.pdf

Presidensi G20 India 2023

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) India yaitu: (1) Trade for Growth & Prosperity; (2) Trade & Resilient GVCs; (3) Integrating MSMEs in Global Trade; (4) Logistics for Trade; dan (5) WTO Reform.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 3 pada tanggal 10 - 12 Juli 2023 di Kevadia serta pertemuan TIWG 4 dan TIMM pada tanggal 21 – 25 Agustus 2023 di Jaipur, India. Pertemuan TIWG 3 membahas 5 (lima) usulan outcome documents India,

sementara Pertemuan TIWG 4 fokus pada sesi drafting teks Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) Statement 2023.

Indonesia sebagai Troika menyampaikan keselarasan agenda prioritas yang diangkat oleh Presidensi G20 India dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengharapkan Keketuaan Indonesia di ASEAN serta Presidensi G20 India menjadi momentum penting kedua forum untuk saling bersinergi dan berkolaborasi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menghasilkan capaian-capaian konkret untuk kepentingan negara berkembang.

Sementara itu Pertemuan TIMM G20 diselenggarakan pada tanggal 24—25 Agustus 2023 di Jaipur India. Pada pertemuan tersebut Indonesia mengajak anggota G20 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengatasi kesenjangan. Indonesia juga menekankan agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama untuk mengembalikan fungsi Sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Selain itu, Indonesia mendorong hasil konkret Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 WTO pada 2024 mendatang. Indonesia menekankan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama atas pembangunan dan pengolahan sumber daya untuk hasilkan nilai tambah.

Tabel 15. Masukan Indonesia yang Diakomodir pada forum G20

Isu prioritas 1 - Trade for Growth & Prosperity	Indonesia mendorong adanya dimensi development dalam trade untuk pencapaian SDGs
Isu prioritas 2 - Trade & Resilient GVCs	Indonesia mendorong alih teknologi dan peningkatan partisipasi negara berkembang dalam GVC
Isu prioritas 3 - Integrating MSMEs in Global Trade	Indonesia mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam akses finansial, akses informasi, dan akses teknologi
Isu prioritas 5 - WTO Reform	Indonesia mendorong reformasi WTO, pemulihan appellate body, penguatan MTS untuk strengthening trust, dan tindak lanjut hasil-hasil MC12
Trade and Investment Ministers' Meeting (TIMM) TIMM Statement	Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Menteri
Leaders' Declaration	Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Presiden

Sasaran Program 3

Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional

Indikator Kinerja Program 3:

Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Tabel 16. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR	2022			2023		
	TARG ET	REALI SASI	CAPAIAN (%)	TARG ET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	-	-	-	83	84,2	109,1

Sumber: DPAKOI (2024)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah melaksanakan kinerja III dengan meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum antar kawasan dan organisasi internasional dengan melakukan Konsultasi Publik sebagai kegiatan untuk memperluas informasi sehingga tersampaikannya pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan-kebijakan perundingan antar kawasan dan organisasi internasional dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

KEBERHASILAN TERCAPAINYA REALISASI PADA INDIKATOR KINERJA 3 yang telah dilaksanakan Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Focus Group Discussion “Strategi Prospek dan Peluang Peningkatan Ekspor Produk Halal ke Negara OKI”, 9 Maret 2023

FGD bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan ekspor produk halal yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia. Kegiatan dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Bappenas, LPPOM MUI, PT. Paragon Technology and Innovation, serta unit internal terkait dari Kementerian Perdagangan.



Gambar 15. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Focus Group Discussion “Strategi Prospek dan Peluang Peningkatan Ekspor Produk Halal ke Negara OKI”

Sesi pertama: Muhammad Syaroni Rofii, Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, memberikan paparan dengan tema “Penguatan Kemitraan Strategis Antara Indonesia dan Dunia Islam: Strategi Peningkatan Daya Saing dan Penetrasi Pasar OKI”. Hal-hal penting yang disampaikan antara lain

- Negara OKI menjadi importir terbesar produk makanan halal, seperti Indonesia (US\$ 169,7 miliar), Turkey (US\$ 121,1 miliar), Pakistan (US\$ 111,8 miliar). Sedangkan eksportir daging halal didominasi negara non-muslim, seperti Brazil (US\$5,19 miliar), Australia (US\$2,36 miliar), India (US\$2,28 miliar), dan Perancis (US\$0,8 miliar).
- Pemerintah perlu mendorong pengusaha Indonesia untuk menggali potensi pasar dunia Islam, terutama melalui OKI dan D-8. Berdasarkan pengamatan, saat ini pengusaha-pengusaha Turkiye relatif lebih aktif berekspansi ke negara anggota OKI.
- Kemendag dan K/L perlu memberikan pelatihan kepada para UMKM, mulai dari standar pengemasan hingga standar halal, memberikan informasi peluang pasar, mengarahkan pengusaha untuk menyasar pasar non-tradisional terutama negara OKI dan D-8.

Sesi kedua: Akhmad Akbar Susamto, Dosen Prodi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal, Universitas Gadjah Mada,

memberikan paparan dengan tema “Peningkatan Aksesibilitas Ekspor Pasar Global bagi Produk Halal Indonesia di Negara-negara OKI”. Hal-hal penting yang disampaikan, antara lain

- Berdasarkan hasil analisis menggunakan empat kuadran yang ditunjukkan oleh Keegan and Green (2011), terdapat 16 negara pasar ekspor potensial produk halal Indonesia, yaitu Filipina, Kamboja, Malaysia, Thailand, RRT, India, Bangladesh, Arab Saudi, Nigeria, Kenya, Turki, Italia, Perancis, Spanyol, Rusia, dan Kanada.
- Untuk memasuki pasar negara-negara ASEAN (Filipina, Kamboja, Malaysia, Thailand), Indonesia dapat memanfaatkan skema ASEAN Economic Community. Sementara untuk sebagian negara lainnya dapat memanfaatkan skema perjanjian perdagangan bilateral.

Sesi ketiga: Catur Prasetyo, Training Manajer IHATEC (Indonesia Halal Training and Education Center), memberikan paparan tema “Mendorong Kerja Sama Internasional dalam Sertifikasi Halal Indonesia di Negara-negara OKI”. Hal-hal penting yang disampaikan yaitu:

- Berdasarkan Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam skor indikator ekonomi global setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
- Tantangan utama perdagangan antara negara terkait isu sertifikasi halal: 1) perbedaan regulasi, standar halal, dan sistem sertifikasi halal di beberapa negara; 2) belum adanya saling keberterimaan antar negara. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat terdapat setidaknya 15 standar halal internasional yang diadopsi oleh berbagai negara, diantaranya OIC/SMIIC 1:2019, UAE.S/GSO 2055-1:2015, MS 1500:2009, dan lainnya.
- Dukungan yang dapat diberikan pemerintah yaitu: 1) MRA (Multilateral Recognition Arrangement) halal yang disepakati secara internasional; 2) fasilitasi dana dan pelatihan pelaku UMKM; 3) menyiapkan data ekspor berdasarkan detail kelompok produk untuk memprediksi kebutuhan ekspor halal potensial.

Sesi keempat: Ary Aprianto, Koordinator Fungsi Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kemlu, menyampaikan paparan dengan tema “Strategi dan Pemetaan Produk dan Jasa Halal di Negara OKI dan D-8”. Hal-hal penting yang disampaikan yaitu:

- Trade Preferential System (TPS-OIC) berpotensi menjadi sarana peningkatan perdagangan halal antar negara anggota OKI, meskipun saat ini baru 13 negara anggota yang menyatakan siap implementasi.
- Peningkatan ekspor produk halal Indonesia juga dapat memanfaatkan skema PTA D-8. Indonesia sudah siap melaksanakan PTA D-8, namun implementasi penuh belum dapat terlaksana karena menunggu pengesahan Supervisory Committee dan hasil pertemuan Trade Ministerial Committee (TMC) bulan Mei 2023 di Bangladesh.

2. Jaring Masukan Strategi Penguatan Prioritas Perdagangan Indonesia Dalam Kerangka G20

Kegiatan jaring masukan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kementerian Perhubungan, Disperindag D.I. Yogyakarta, LPEM UI, iDEA dan KADIN, serta moderator dari CSIS Indonesia. Total partisipan yang hadir pada kegiatan sebanyak lebih dari 50 peserta.

Kegiatan bertujuan untuk berbagi pandangan mengenai akselerasi perdagangan digital Indonesia untuk mendorong kinerja perdagangan internasional di forum G20 dan kolaborasi negara G20 untuk menjaga ketahanan rantai pasok global sebagai kunci meningkatkan perdagangan global di tengah proyeksi negatif tahun 2023.



Gambar 16. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Jaring Masukan Strategi Penguatan Prioritas Perdagangan Indonesia Dalam Kerangka G20

Kegiatan membahas 2 (dua) subtema yaitu:

I. Akselerasi Perdagangan Digital Indonesia dalam rangka Mendorong Kinerja Perdagangan Internasional dalam Kerangka G20

- Pada forum *Digital Economy Working Group* (DEWG), Presidensi G20 India tahun ini mendorong pembahasan infrastruktur digital bagi publik, keamanan siber, dan *digital skilling*. Perdagangan digital sebagai bagian dari transformasi berbasis digital masih menghadapi berbagai kendala diantaranya kesenjangan *level of playing field*; ketimpangan kapasitas, akses pasar, dan sumber daya; kompleksitas interaksi antara moda bisnis baru dan konvensional; serta ketimpangan utilisasi data akibat ketiadaan tata kelola data universal.
- Tantangan utama lainnya adalah perbedaan kepentingan antara negara pengguna teknologi dengan negara produsen teknologi. Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai *norm settler* maupun *bridge builder* di antara berbagai kepentingan yang dapat

menegaskan posisi Indonesia dalam pembahasan isu-isu digital di forum G20.

- Lebih lanjut, Indonesia juga perlu terus mendorong pembahasan terkait ketersediaan infrastruktur digital, literasi dan kecakapan digital, dampak kemajuan teknologi, keamanan digital, dan arus data lintas batas yang dapat mendorong pertumbuhan perdagangan digital Indonesia terutama bagi peningkatan integrasi UMKM dalam perdagangan global.
- Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya agar para pelaku usaha dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan e-commerce ini, salah satunya dengan mengutamakan produk dalam negeri untuk dapat dijual di platform digital. Masuknya pelaku usaha domestik ke platform digital diharapkan tidak hanya memberikan pendapatan yang lebih besar tetapi juga memberikan efek akses pasar yang lebih luas dan penjualan *cross-border*.
- Perwakilan pelaku usaha menyampaikan beberapa tantangan utama UMKM dalam beralih ke platform digital diantaranya yaitu akses ke teknologi, modal dan investasi, akses ke pasar yang lebih luas, serta keterampilan manajemen bisnis.

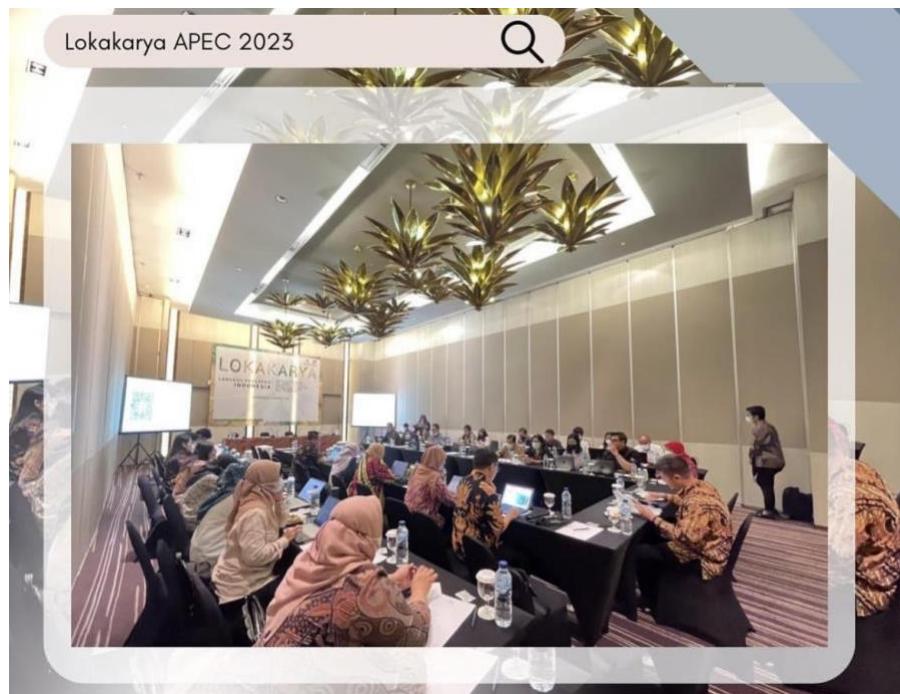
II. **Strategi G20 dalam Menjaga Ketahanan Rantai Pasok Global**

- India tahun ini berfokus pada aspek digitalisasi sektor logistik dalam kaitannya dengan peningkatan ekosistem logistik digital dan infrastruktur logistik. Dalam perspektif Indonesia, narasumber menyampaikan permasalahan utama adalah adanya tantangan ketidakseimbangan perdagangan yang menyebabkan lebih murahnya pasokan dari luar negeri dibandingkan dalam negeri. Keterbatasan armada kapal angkut Indonesia juga menjadi faktor penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia.
- Sementara itu, disrupti rantai pasok global juga berpengaruh terhadap perdagangan rantai nilai global (Global Value Chains/GVCs) dimana saat ini tantangan yang dihadapi adalah menciptakan inklusivitas GVCs untuk perdagangan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi salah satu cara mengatasi tantangan dimaksud serta pentingnya menjaga stabilitas impor dibandingkan melakukan perluasan/diversifikasi impor.
- Fokus utama yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan rantai nilai global yaitu menjadikan ekonomi digital sebagai arus utama, memperbaiki iklim dan persaingan usaha di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pentingnya *best practice* untuk meningkatkan literasi digital.
- Sebagaimana mandat G20 Bali Leaders Declaration 2022, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan kolaborasi dan elaborasi dalam penanganan disrupti rantai pasok melalui: a) *Real Time Data Sharing*: Mengkoneksikan sumber data melalui sentral logistik nasional dari masing-masing daerah terhadap kebutuhan bahan pokok dan jumlah bahan pokok yang tersedia; dan b) *Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement*: Percepatan Kerjasama yang dapat mendorong industrialisasi untuk pertumbuhan ekonomi.

- Indonesia juga terus meningkatkan digitalisasi ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW), INAPORTNET, SITOLAUT, dan beberapa inovasi lainnya.

Berdasarkan *pre-questionnaire* dan *post-questionnaire* yang dibagikan kepada peserta kegiatan, terhitung sebanyak 35 dari 38 responden yang melakukan pengisian kuesioner menyatakan adanya peningkatan pemahaman mengenai isu-isu yang dibahas setelah mengikuti kegiatan jaring masukan, sehingga terdapat peningkatan pemahaman sebesar 92%.

3. Lokakarya Langkah Progresif Indonesia untuk Penanganan Limbah Plastik dan Sinergisitas Isu Keberlanjutan APEC Tahun 2023



Gambar 17. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Lokakarya Langkah Progresif Indonesia untuk Penanganan Limbah Plastik dan Sinergisitas Isu Keberlanjutan APEC Tahun 2023

4. Jaring Masukan Pemanfaatan COMCEC Project Funding sebagai Strategi Peningkatan Ekspor ke Negara Anggota OKI

- Kegiatan FGD telah diselenggarakan tanggal 31 Mei 2023 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, LPPOM MUI, PT Paragon Technology and Innovation, serta unit internal terkait di Kementerian Perdagangan. FGD bertujuan untuk menjaring masukan dan memberikan pemahaman dalam memanfaatkan peluang pendanaan COMCEC Project Funding bagi institusi terkait dan pelaku usaha.
- FGD menghadirkan dua pembicara, yakni Ibu Penny D. Herasati selaku Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, yang memaparkan tentang “Optimalisasi Keanggotaan Indonesia dalam OKI melalui COMCEC Project

Funding (CPF)", serta pembicara kedua adalah Bapak Catur Prasetyo selaku Training Manager IHATEC, yang memaparkan tentang "Kisah Sukses Pemanfaatan COMCEC Project Funding sebagai bagian dari Keberterimaan Sertifikat Halal Indonesia di Negara-negara OKI.

- Kemlu sebagai koordinator kerja sama OKI mendukung proyek di bawah pendanaan CPF dan mengimbau setiap *focal point* setiap *Working Group* untuk berpartisipasi setiap tahunnya. Kemlu juga membagikan strateginya dalam pengajuan proposal proyek, antara lain dengan mengidentifikasi negara target dan produk potensial serta mengidentifikasi tantangan pemasaran produk halal Indonesia.
- Dalam mengajukan proposal proyek, IHATEC menekankan perlu adanya keselarasan antara Strategi COMCEC dengan isu-isu strategis di Indonesia, agar proyek yang dijalankan tepat sasaran dan dapat meningkatkan perdagangan Indonesia.
- Dalam rangka persiapan pembukaan COMCEC Project Funding tahun 2024, Kemendag akan berkoordinasi dengan IHATEC dan K/L terkait dalam mendiskusikan usulan proyek. Hal ini sebagai bentuk nyata pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam OKI.

Berdasarkan *pre-questionnaire* dan *post-questionnaire* yang dibagikan kepada sebanyak kurang lebih 50 peserta, dinyatakan adanya peningkatan pemahaman mengenai diskusi yang dibahas setelah mengikuti kegiatan jaring masukan, sehingga terdapat peningkatan pemahaman sebesar 87%.



Gambar 18. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Jaring Masukan Pemanfaatan COMCEC Project Funding sebagai Strategi Peningkatan Ekspor ke Negara Anggota OKI

5. **Diskusi Kesiapan Kebijakan Indonesia untuk Isu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perundingan terkait persiapan Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP) dan Perundingan APEC lainnya**

Diskusi diselenggarakan pada 6 Oktober 2023 di Bandung. Diskusi bertujuan untuk mempersiapkan posisi Indonesia terkait isu BUMN apabila perundingan terkait provisi BUMN bergulir pada perundingan *Free Trade Area of Asia Pacific* (FTAAP) di fora APEC dan perundingan perdagangan internasional lainnya agar selaras dengan arah kebijakan domestik Indonesia.

Diskusi dihadiri oleh narasumber dan perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), BUMN (PT. Telkom Indonesia dan PT. Pertamina), Akademis (APEC Study Center Universitas Indonesia & Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada) dan beberapa unit internal Kementerian Perdagangan (Dir. Perundingan ASEAN, Dir. Perundingan Bilateral, Dir. Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional).



Gambar 19. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Diskusi Kesiapan Kebijakan Indonesia untuk Isu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perundingan terkait persiapan Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP) dan Perundingan APEC lainnya

Perundingan isu BUMN telah dibahas dalam beberapa perundingan baik di forum multilateral seperti di WTO dan bilateral pada perundingan Indonesia-EFTA CEPA (IE-CEPA), Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA). Beberapa isu BUMN yang menjadi pembahasan dalam perundingan antara lain:

- Mengatasi distorsi perdagangan yang menguntungkan BUMN yang melakukan kegiatan komersial.
- Memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh BUMN didasarkan pada pertimbangan komersial khususnya dengan mengatasi diskriminasi dan subsidi yang dapat mendistorsi perdagangan.

Secara domestik, saat ini Indonesia sudah menerapkan prinsip transparansi dalam BUMN, melalui keterbukaan informasi publik. Pada UU

No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, posisi BUMN dianggap sama dengan swasta sebagai pelaku usaha, namun terdapat pengecualian untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penugasan negara melalui BUMN atas dasar Undang-Undang.

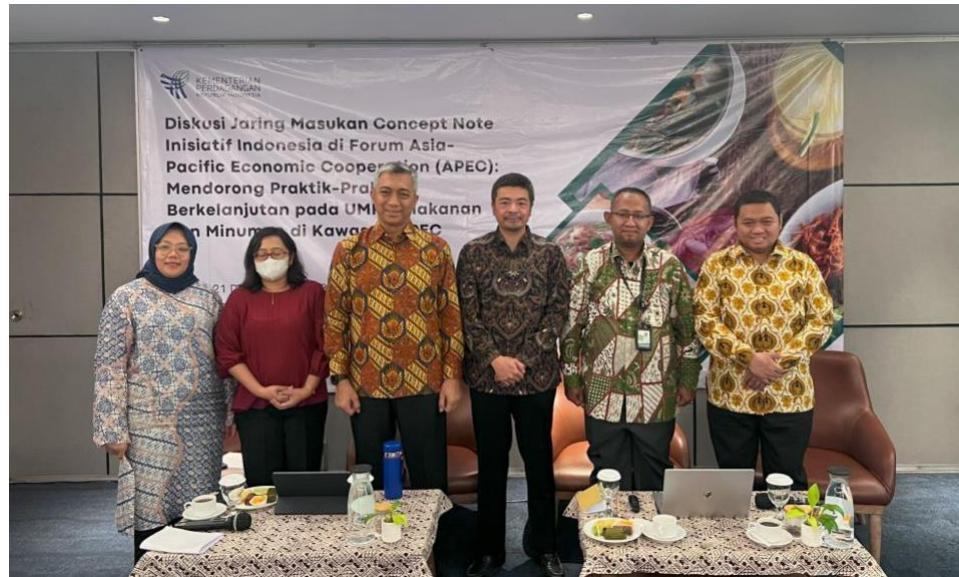
Diskusi menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia, antara lain: (i) Perbedaan definisi BUMN di antara Indonesia dengan ekonomi lain yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian regulasi domestik dengan kesepakatan pada perjanjian perdagangan internasional; (ii) Tantangan persaingan usaha dengan perusahaan asing yang bergerak di sektor usaha yang sama dengan BUMN; (iii) Tantangan dalam menjalankan fungsi jasa sosial kepada publik (*Public Service Obligation/PSO*); dan (iv) Kemungkinan penyesuaian dalam syarat terkait pengadaan oleh pemerintah.

6. Jaring Masukan Concept Note Inisiatif Indonesia di Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Mendorong Praktik-Praktik Berkelanjutan pada UMKM Makanan dan Minuman di Kawasan APEC

Kegiatan jaring masukan diselenggarakan tanggal 21 Desember 2023 di Bandung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi UMKM dan IMKM di sektor makanan dan minuman (F&B) di Indonesia dan kesiapan untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan serta menjaring masukan atas draf *concept note* usulan Indonesia dengan menjajaki topik-topik yang perlu dimasukkan dalam workshop agar selaras dengan kepentingan nasional di level regional.

Draf versi awal *concept note* berjudul “APEC Workshop on Fostering MSMEs in the Sustainable Food and Beverages Sector” yang direncanakan akan diajukan di forum *Committee on Trade and Investment (CTI)* APEC pada tahun 2024. Proyek ini bertujuan untuk mengadakan workshop untuk membangun kesadaran dan memperkuat kapasitas UMKM dalam sektor F&B yang berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri oleh narasumber dan peserta dari internal Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Universitas Gajah Mada.



Gambar 20. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Jaring Masukan Concept Note Inisiatif Indonesia di Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Mendorong Praktik-Praktik Berkelanjutan pada UMKM Makanan dan Minuman di Kawasan APEC

Hasil dari kegiatan jaring masukan adalah sebagai berikut:

- Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pangan menghadapi beberapa hambatan dan tantangan antara lain meliputi kurangnya kualitas bahan baku, kurangnya riset dan penggunaan teknologi produksi pangan, merk dan desain kemasan yang kurang menarik, kurangnya pemenuhan standarisasi produk dan kurangnya pemanfaatan komunitas digital dalam memasarkan produknya.
- Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, pemerintah telah memiliki kebijakan untuk mendukung pengembangan IKM termasuk melalui pendampingan dana melalui Dana Alokasi Khusus, pembinaan teknis dan bisnis kepada IKM, peningkatan kapasitas.
- Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk mendorong pengembangan industri hijau melalui PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM untuk menerapkan praktik-praktik keberlanjutan antara lain i) terbatasnya akses ke sumber daya dan modal; ii) kurangnya kesadaran dan penerapan praktik berkelanjutan; iii) kesulitan dalam mematuhi peraturan terkait keberlanjutan; iv) kurangnya akses pemasaran; dan v) kurangnya informasi atau pengetahuan tentang ekonomi hijau.
- Peserta Diskusi menyarankan agar workshop perlu menyasar UMKM yang setidaknya sudah memiliki kesadaran terhadap isu keberlanjutan agar hasil dari workshop relevan dan dapat diimplementasikan oleh peserta UMKM.

- Mengenai concept note usulan Indonesia, perlu dipetakan anggota APEC yang berpotensi mendukung proposal Indonesia (co-sponsor) dengan memperhatikan kesamaan kondisi domestik maupun kesamaan kepentingan dalam rantai pasok.
- Proposal sebaiknya difokuskan pada isu keberlanjutan pada sektor makanan dan minuman yang lebih spesifik dengan mendorong model kerjasama pentahelix dimana terhadap unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.
- Mengingat proposal diupayakan agar disepakati di forum CTI, diharapkan fokus proposal menekankan upaya peningkatan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Adapun rekomendasi lainnya adalah berkolaborasi dengan *focal point* APEC *Small Medium Enterprises Working Group* (SMEWG) Indonesia untuk mendorong proposal pada forum tersebut.

BAB IV

KINERJA ANGGARAN

Pagu awal tahun sebesar Rp. 6.500.000.000,-. Setelah penyesuaian/penghematan menjadi sebesar Rp 5.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.974.436.680,- atau 97,54%. Pos anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 125.563.320,- atau 2%. Penyebab masih adanya sisa anggaran karena terdapat selisih administrasi antara penggunaan anggaran dan pelaksanaannya.

Tabel 17. Realisasi Kinerja Anggaran DPAKOI 2023

Penyerapan Anggaran DPAKOI T.A 2023 Per RO				
Kode	Unit / Tim Kerja	Anggaran T.A 2023	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran T.A 2023
3744	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	5.100.000.000	4.974.436.680	125.563.320
1	TPS OIC	315.977.000	305.963.860	10.013.140
2	Akses	957.675.000	951.594.552	6.080.448
3	Fasilitasi	1.222.153.000	1.213.355.866	8.797.134
4	Antar Fora	105.835.000	100.364.813	5.470.187
5	Kopi	203.368.000	200.468.895	2.899.105
6	Karet	502.335.000	463.488.328	38.846.672
7	Lada	186.480.000	180.418.650	6.061.350
8	Kelapa	81.426.000	79.881.666	1.544.334
9	G20	638.339.000	634.572.275	3.766.725

Sumber: DPAKOI (2024)

Tabel 18. Realisasi Anggaran DPAKOI 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Akses Pasar Barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	1.063.664.000	1.052.145.532	98,92%
2	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statemen di tingkat regional dan internasional	873.738.000	871.712.392	99,77%
3	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundungan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	495.060.000	491.065.930	99,19%
	Jumlah	5.100.000.000	4.974.436.680	97,57%

Sumber: DPAKOI (2024)

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional merupakan unit Eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan akses perdagangan dan akses investasi APEC, fasilitasi perdagangan dan fasilitasi investasi APEC, organisasi komoditi, dan organisasi D8/AOI sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2. Berdasarkan DIPA 2023, alokasi pagu awal Dit. Perundingan AKOI sebesar Rp. 6.500.000.000, dan Pada tahun ini terdapat refocussing anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah), sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah).
3. Realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.974.436.680 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 97,54%.
4. Secara keseluruhan tahun anggaran, penyerapan anggaran ini telah memenuhi harapan secara umum dengan tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja.

REKOMENDASI

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan agar dapat dilakukan lebih cermat, khususnya dalam menetapkan target kinerja dengan mempertimbangkan baik metode penghitungan maupun sumber daya yang tersedia, termasuk faktor lain seperti perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

1. Walaupun penyusunan rencana pelaksanaan program atau kegiatan telah dilakukan dengan cukup cermat, namun adanya refocussing menyebabkan penyesuaian terhadap program / kegiatan yang dilakukan oleh direktorat. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target kinerja yang sesuai anggaran setelah refocussing.
2. Untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja, agar dari masing-masing indikator ditetapkan target secara periodik/triwulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga setiap pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerjanya dapat terpantau dengan baik.

Laporan kinerja DPAKOI ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan

capaian kinerja DPAKOI yang akan berdampak positif dalam mewujudkan wibawa diplomasi perdagangan di antar kawasan dan Organisasi Internasional untuk kepentingan rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional	1 Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	$KS_t = \sum KS_{jt}$ <p>KS_t = Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan</p> <p>KS_{jt} = Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional			
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	1 Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	$D_t = \frac{\sum D_{jt}}{\sum E_{jt}} \times 100$ <p>D_t = Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p> <p>D_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p> <p>E_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan			

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (3)	CARA PERHITUNGAN (4)	SUMBER DATA (5)
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional	1 Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	$P_t = \frac{\sum P_{jt}}{\sum Q_{jt}} \times 100$ <p> P_t = Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan P_{jt} = Jumlah peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang meningkat pemahamannya di tahun berjalan Q_{jt} = Jumlah total kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan </p>	Informasi dan dokumen kuesioner pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Lampiran 2. PERKIN DPAKOI 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN DI FORUM ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di negara mitra antar kawasan dan organisasi internasional	Jumlah kerja sama dalam rangka peningkatan akses pasar barang di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Kerja sama	5
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Percentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Percentase	80
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Percentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Percentase	83